

Rencana Strategis **KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU**

2020-2024



**KEMENTERIAN AGAMA
KOTA PALU**

JLN. BANTILAN NO. 16, PALU - SULAWESI TENGAH

Rencana Strategis
**KEMENTERIAN AGAMA
KOTA PALU**

2020-2024



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA PALU
NOMOR 093 TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA STRATEGIS KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU
TAHUN 2020-2024.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU

- Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur bahwa Pimpinan Kementerian/Lembaga menetapkan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang merupakan penjabaran dari visi-misi presiden-wakil presiden serta Prioritas Nasional;
- b. Bahwa dengan ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2020-2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palu tentang Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kota Palu Tahun 2020-2024.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 - d. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 - e. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80)
 - f. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 - g. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;
 - h. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 - i. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117).

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA TENTANG RENCANA STRATEGIS KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU TAHUN 2020-2024.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kota Palu 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kota Palu Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun sebagai pedoman bagi satuan kerja untuk:
1. Penyusunan Rencana Strategis;
 2. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan; dan
 3. Penyusunan Rencana/Program Pembangunan lintas sectoral.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 03 Februari 2021



KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA PALU,

H. NASRUDDIN L. MIDU



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kota Palu Periode 2020-2024 dapat disusun dengan baik. Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kota Palu disusun dengan berpedoman pada Renstra Kementerian Agama Periode 2020-2024 dan Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2020-2024

Renstra Kantor Kementerian Agama Kota Palu periode 2020-2024 ini memuat tujuan, sasaran, dan target pendanaan selama 5 (lima) tahun mendatang. Renstra Kantor Kementerian Agama Kota Palu Periode 2020-2024 menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh satuan kerja Kantor Kementerian Agama Kota Palu dalam periode lima tahun ke depan. Renstra Kementerian Agama Kota Palu ini diharapkan dapat mendukung pencapaian program pemerintah pada sektor pembangunan bidang Agama dan Pendidikan tahun 2024.

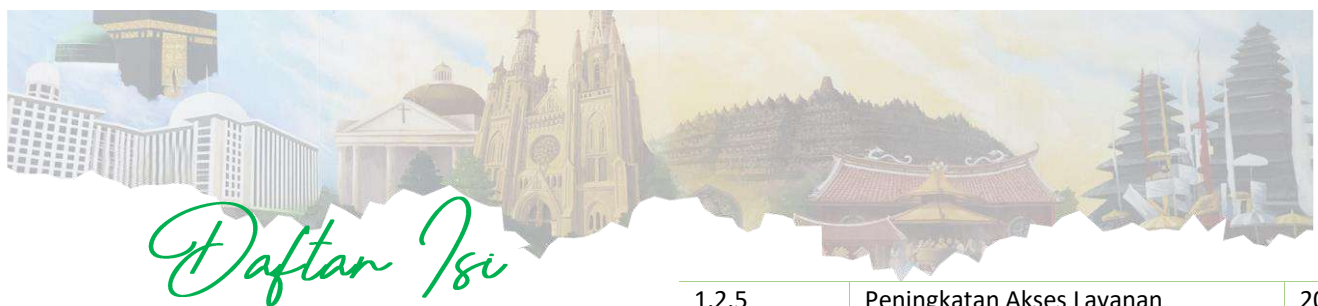


Palu, 01 Februari 2020

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Palu



H. Nasruddin L. Midu



Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi umum	1
1.1.1 Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama	2
1.1.1.1 Peningkatan Kualitas Tenaga Penyuluh Agama	3
1.1.1.2 Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan	4
1.1.2 Pengukuhan Suasana Kerukunan Hidup Umat Beragama yang Harmonis	5
1.1.3 Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Kehidupan Beragama yang Berkualitas dan Merata	6
1.1.3.1 Pengembangan Rumah Ibadah	6
1.1.3.2 Kantor Urusan Agama (KUA) yang Memenuhi Standar	7
1.1.3.3 Penyuluh Agama yang Kompeten	8
1.1.3.4 Penghulu yang Kompeten	9
1.1.4 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	9
1.1.5 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pembangunan Bidang Agama	11
1.1.5.1 Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja	11
1.1.5.2 Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	12
1.1.6 Peningkatan Akses Layanan Pendidikan	14
1.1.7 Peningkatan Mutu Pendidikan Agama dan Keagamaan	14
1.2 Potensi dan Permasalahan	15
1.2.1 Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama	15
1.2.2 Pengukuhan Suasana Kerukunan Hidup Umat Beragama yang Harmonis	17
1.2.3 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	18
1.2.4 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pembangunan Bidang Agama	19

1.2.5	Peningkatan Akses Layanan Pendidikan	20
1.2.6	Peningkatan Mutu Pendidikan Agama dan Keagamaan	21
BAB 2	TUJUAN DAN SASARAN	23
2.1	Tujuan Kementerian Agama	23
2.2	Sasaran	23
BAB 3	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	27
3.1	Target Kinerja	27
3.2	Kerangka Pendanaan	30
BAB 4	PENUTUP	37
LAMPIRAN		
Lampiran I	Matriks Kinerja dan Pendanaan Program	
Lampiran II	Matriks Kinerja dan Pendanaan Program	
Lampiran III	Tim Penyusun Renstra Kementerian Agama Kota Palu Tahun 2020-2024	

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tahun 2015-2019	4
Tabel 1.2	Jumlah Keberangkatan Haji Kota Palu	10
Tabel 1.3	Hasil Capaian Output Kantor Kementerian Agama Kota Palu Tahun 2015-2019	12
Tabel 1.4	Peta pendidikan pada Kemenag Tahun 2019	14
Tabel 3.1	Rencana Pendanaan 8 Program Tahun 2020-2024	30
Tabel 3.2	Rencana Pendanaan 4 Program Tahun 2020-2024	33

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Jumlah Penduduk dan Jumlah Penyuluh Agama Kota Palu	3
Gambar 1.2	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tahun 2015-2019	4



BAB

1

Pendahuluan





BAB I

Pendahuluan

1.1 Kondisi Umum

Kondisi umum dari Renstra Kantor Kementerian Agama Kota Palu Tahun 2020-2024 berisi tentang pencapaian-pencapaian Kantor Kementerian Agama Kota Palu pada periode pembangunan sebelumnya, yaitu tahun 2015-2019. Pada Renstra Kantor Kementerian Agama Kota Palu Tahun 2015-2019, program-program yang dijalankan bertujuan untuk mendukung visi “Terwujudnya Masyarakat Kota Palu yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, dan Sejahtera Lahir Batin dalam Rangka Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Berdasarkan visi tersebut, maka terlihat bahwa pada periode Renstra Kantor Kementerian Agama Kota Palu Tahun 2015-2019, visi pembangunannya terbagi atas empat komponen, yaitu: taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera.

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Kantor Kementerian Agama Kota Palu telah menetapkan 7 (tujuh) misi yaitu:

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
2. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama;
3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas;
4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan;
5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel;
6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan; dan
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya.



Visi dan misi tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk 8 (delapan) tujuan dengan sasarannya masing-masing berikut indikatornya guna memudahkan realisasi dan pengukuran capaiannya, yaitu:

1. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
2. Pengukuhan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis;
3. Pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas dan merata;
4. Peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan;
5. Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah;
6. Peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama;
7. Peningkatan akses pendidikan umum berciri khas agama dan pendidikan keagamaan; dan
8. Peningkatan mutu pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan.

Adapun capaian sasaran dimaksud selama kurun waktu 2015-2019 berdasarkan indikatornya masing-masing disajikan dalam uraian berikut.

1.1.1 Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama

Upaya peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama merupakan agenda penting dan strategis. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama pada pemeluk agama diukur melalui indikator : 1) meningkatnya jumlah umat beragama yang aktif pada rumah ibadah; dan 2) meningkatnya jumlah rumah ibadah yang melaksanakan kegiatan sosial keagamaan. Dua indikator berikut komponennya tersebut menjadi penting untuk melihat dinamika ruang publik sehubungan dengan kepedulian sosial, relasi antar manusia, melestarikan lingkungan, etika dan budi pekerti, serta kepatuhan terhadap negara dan pemerintah.

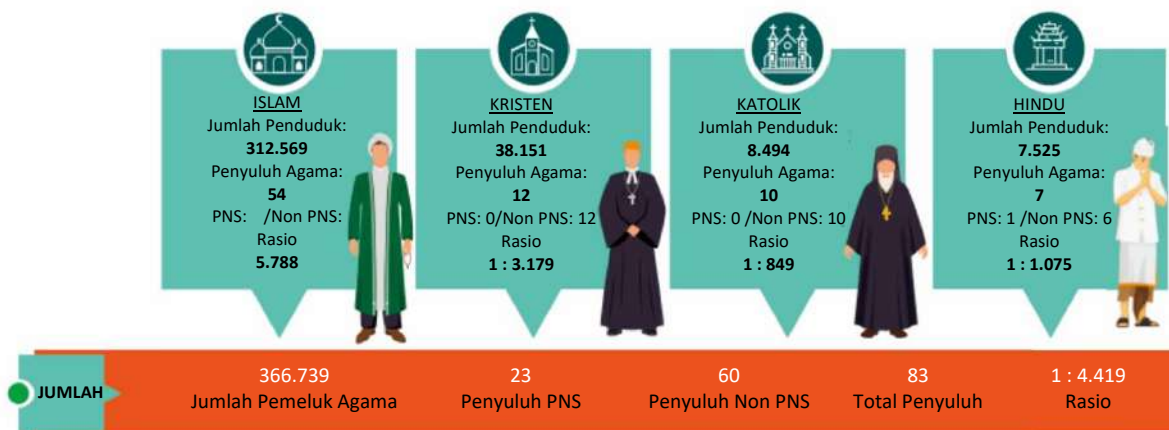


1.1.1.1 Peningkatan Kualitas Tenaga Penyuluh Agama

Penyuluh Agama memainkan peranan strategis dalam memperkuat kehidupan beragama warga masyarakat. Kantor Kementerian Agama Kota Palu telah memprogramkan peningkatan kuantitas penyuluh agama dengan merekrut tenaga penyuluh agama baik PNS maupun Non-PNS. Peningkatan jumlah penyuluh Non-PNS yang direkrut Kementerian Agama berasal dari sebagian pemuka dan ahli agama. Selain itu, peningkatan kualitas dalam pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama yang berisi nilai-nilai ketuhanan, dilakukan secara baik mandiri maupun berkelompok. Peningkatan kompetensi dan kinerja penyuluh agama juga telah dilakukan melalui berbagai forum pembinaan. Rasio penyuluh dibandingkan jumlah umat beragama di Kota Palu adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1

Jumlah Penduduk dan Jumlah Penyuluh Agama Kota Palu



Sampai tahun 2019, jumlah penyuluh agama yang tersedia belum sebanding dengan jumlah umat yang dilayani, ini ditunjukkan pada gambar di atas dimana 1 orang penyuluh agama harus melayani 4.419 umat beragama secara rata-rata, sehingga Kementerian Agama Kota Palu terus berusaha meningkatkan jumlah penyuluh agama di Indonesia.



1.1.1.2 Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan

Penyelenggaraan kegiatan keagamaan telah berhasil menumbuhkan kualitas spiritual keagamaan di kalangan umat beragama dalam pemahaman nilai-nilai ajaran agama. Dukungan Kementerian Agama berupa bantuan dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan hari besar keagamaan dan penyelenggaraan lomba keagamaan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.1

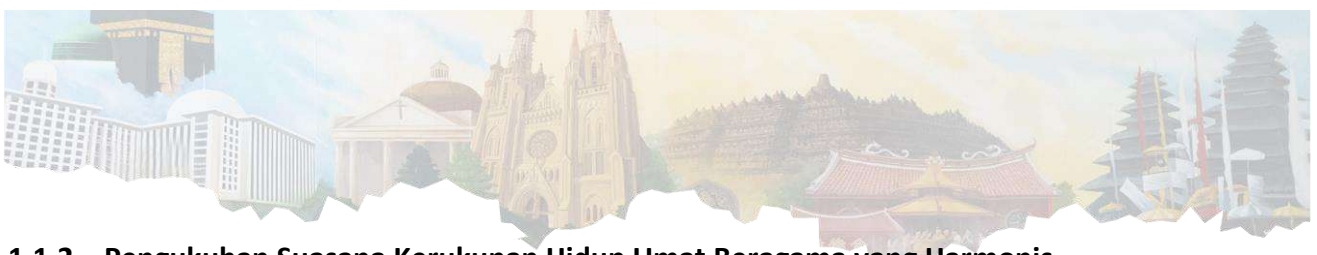
Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tahun 2015-2019

No	Satuan Kerja	Kegiatan Keagamaan	Volume Kegiatan	Lokasi Kegiatan
1	Bimas Islam	Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Kota Palu	1 Kali	2017 (Kecamatan Ulujadi)
		Seleksi Tilawatil Qur'an Tingkat Kota Palu	1 Kali	2016 (Kecamatan Mantikulore)
2	Bimas Kristen	Kirab Obor Paskah Nasional di Kota Palu	1 Kali	2018 (Kantor Walikota Palu)
		Kegiatan TOT Paduan Suara Gereja Se-Kota Palu yang diselenggarakan oleh LPPD Kota Palu Bekerja Sama dengan Bimas Kristen Kota Palu	1 Kali	2019 (Gracela Music Palu)

Gambar 1.2

Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tahun 2015-2019



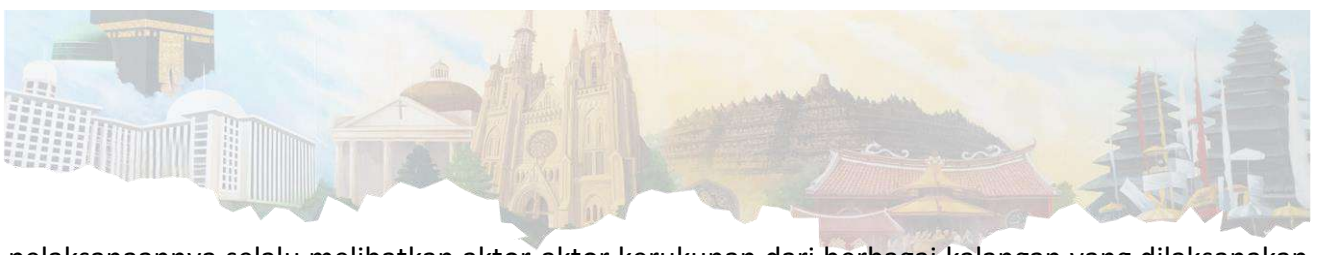


1.1.2 Penguatan Suasana Kerukunan Hidup Umat Beragama yang Harmonis

Kerukunan umat beragama adalah kondisi dimana antar umat beragama dapat saling menerima, saling menghormati keyakinan masing-masing, saling tolong menolong, dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Dalam konteks ini, kerukunan beragama berarti kebersamaan antara umat beragama dengan pemerintah dalam rangka suksesnya pembangunan di wilayah Kota Palu serta senantiasa menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai upaya terwujudnya masyarakat Kota Palu yang rukun dalam keberagaman agama ditempuh melalui layanan-layanan strategis dalam bentuk penguatan dialog lintas agama, knowledge sharing aktor-aktor kerukunan umat beragama, dan konsinyering tokoh lintas agama.

Kementerian Agama Kota Palu telah berupaya mempraktikkan sejumlah strategi, pendekatan, dan kegiatan untuk mewujudkan dan memelihara kerukunan umat beragama melalui kemitraan dengan seluruh aktor-aktor kerukunan yang merupakan semua komponen masyarakat yang di antaranya terdiri atas pimpinan majelis-majelis agama, pimpinan ormas-ormas keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda yang berasal dari kalangan mahasiswa dan pelajar, penyuluh agama, pengawas, dosen, guru agama, dan insan jurnalis. Disebut „aktor“, karena diharapkan tokoh-tokoh tersebut dapat memberikan pengaruhnya kepada masyarakat atas apa-apa yang telah disampaikan dalam kegiatan dialog, workshop, dan seminar terkait kerukunan. Kementerian Agama Kota Palu selama tahun 2015-2019 juga terus merealisasikan bantuan operasional bagi FKUB dengan total bantuan mencapai Rp.200.000.000.

Selain itu, Kegiatan-kegiatan dalam meningkatkan moderasi beragama telah dilaksanakan di Kota Palu. Kegiatan Dialog Lintas Agama dilaksanakan di tahun 2015 dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang, tahun 2017 dengan jumlah peserta sebanyak 90 orang, tahun 2018 dengan jumlah peserta sebanyak 75 orang, dan di tahun 2019 dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang, yang dalam



pelaksanaannya selalu melibatkan aktor-aktor kerukunan dari berbagai kalangan yang dilaksanakan dengan mempromosikan ujaran keagamaan yang moderat.

Hasil yang dicapai adalah meningkatnya kesadaran terhadap realitas moderasi beragama dan multikultural serta memahami makna kemajemukan sosial, multi-kultur dan multi-religi sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, harmonis, dan memiliki komitmen yang kuat terhadap agama, bangsa dan negara.

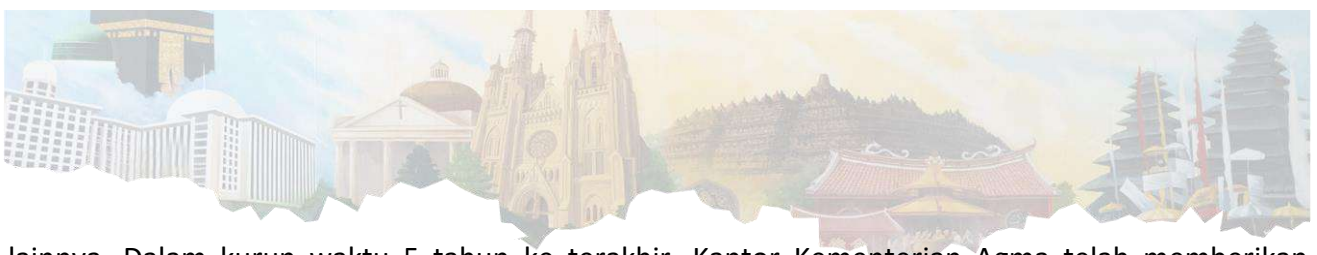
1.1.3 Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Kehidupan Beragama yang Berkualitas dan Merata

Tugas menyelenggarakan pelayanan keagamaan adalah amanah pokok Kementerian Agama, tak terkecuali Kantor Kementerian Agama Kota Palu sebagai institusi vertikal. Keberhasilan dalam meningkatkan pelayanan keagamaan bagi umat beragama ditandai dengan beberapa indikator, yaitu: 1) Jumlah Sarana Rumah Ibadah yang memenuhi standar; 2) Jumlah Penyuluh Agama yang memenuhi kompetensi; 3) Jumlah KUA yang memenuhi standar; dan 4) Jumlah Penghulu yang memenuhi kompetensi.

1.1.3.1 Pengembangan Rumah Ibadah

Rumah ibadah merupakan sarana keagamaan yang penting bagi pemeluk agama di suatu tempat. Selain sebagai simbol “keberadaan” pemeluk agama, rumah ibadah juga sebagai tempat penyiaran agama dan tempat melakukan ibadah. Artinya, fungsi rumah ibadah di samping sebagai tempat peribadahan diharapkan dapat memberikan dorongan yang kuat dan terarah bagi jamaahnya, agar kehidupan spiritual keberagamaan bagi pemeluk agama tersebut menjadi lebih baik. Tahun 2019 di Kota Palu telah tersedia 3.554 masjid, 107 gereja Kristen, 2 gereja Katolik, 3 pura, dan 1 vihara.

Kantor Kementerian Agama Kota Palu telah memberikan bantuan stimulus fasilitasi sarana dan prasarana rumah ibadah dalam bentuk pembangunan, rehabilitasi, dan sarana pendukung



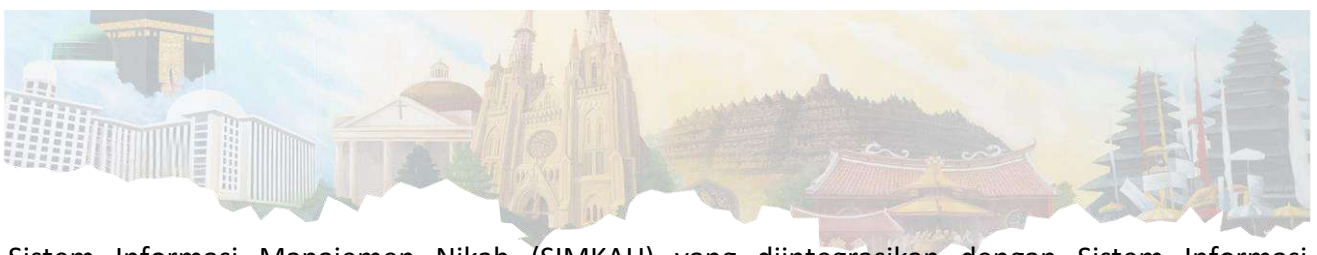
lainnya. Dalam kurun waktu 5 tahun ke terakhir, Kantor Kementerian Agama telah memberikan bantuan sebesar Rp. 385.777.000 untuk pembangunan dan peningkatan fasilitas rumah ibadah di Kota Palu.

1.1.3.2 Kantor Urusan Agama (KUA) yang Memenuhi Standar

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. KUA Kecamatan berkedudukan di kecamatan dan dipimpin oleh Kepala dengan tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.

Di samping pelayanan administrasi keagamaan, di KUA juga terdapat berbagai bentuk dan jenis layanan lain, seperti layanan hisab rukyat, layanan data dan informasi keagamaan, bimbingan manasik haji, konsultasi keluarga sakinah, bimbingan perkawinan dan lain-lain. Kini KUA telah menjadi lembaga publik yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas aplikasi layanan berbasis IT, seperti Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), Sistem Informasi Masjid (SIMAS), Sistem Informasi Manajemen Penerangan Agama Islam (SIMPENAIIS), dan Sistem Informasi Manajemen Penghulu (SIM Penghulu). Satu langkah penting capaian dalam pelayanan keagamaan adalah telah terjalinnya kerja sama (MoU) dengan Kemendagri dan MA dalam integrasi pengelolaan data kependudukan.

Jumlah kecamatan di Kota Palu berjumlah 8 kecamatan, dan gedung KUA yang ada berjumlah 8 unit yang terdiri dari 4 gedung KUA yang berstatus kontrak dan 4 gedung KUA milik Kementerian Agama. Untuk memenuhi standar mutu layanan KUA, hingga tahun 2019 Kantor Kementerian Agama Kota Palu telah membangun 1 gedung balai nikah melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di tahun 2019. Selain itu dikembangkan pelayanan KUA berbasis sistem informasi yang berupa data publik aktif dan pasif, untuk meningkatkan tingkat keterjangkauan informasi. Salah satunya adalah



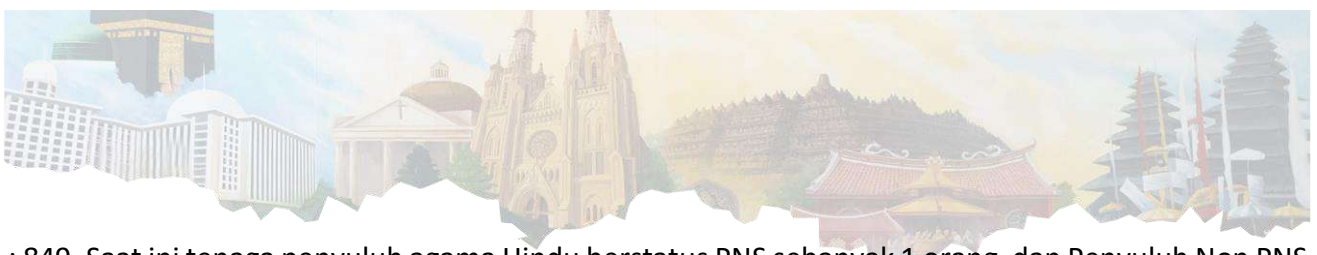
Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAD) Kementerian Dalam Negeri, sehingga dapat dihindari terjadinya duplikasi data peristiwa nikah.

1.1.3.3 Penyuluh Agama yang Kompeten

Penyuluh Agama memainkan peranan strategis dalam memperkuat kehidupan beragama warga masyarakat. Kantor Kementerian Agama Kota Palu telah memprogramkan peningkatan kuantitas penyuluh agama dengan merekrut tenaga penyuluh agama baik PNS maupun Non-PNS. Dalam meningkatkan kualitas penyuluh agama, mulai tahun 2019 dibangun sistem elektronik kinerja penyuluh agama sebagai instrumen pengukuran kinerja. Peningkatan jumlah penyuluh Non-PNS yang direkrut Kantor Kementerian Agama Kota Palu berasal dari sebagian pemuka dan ahli agama. Selain itu, peningkatan kualitas dalam pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama yang berisi nilai-nilai ketuhanan, dilakukan secara baik mandiri maupun berkelompok.

Penyuluh agama merupakan salah satu unsur penting dalam upaya peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama kepada masyarakat. Sampai tahun 2019, jumlah penyuluh agama berstatus PNS untuk pemeluk agama Islam sebanyak 23 orang, sedangkan penyuluh agama Non PNS sebanyak 32 orang yang tersebar di seluruh Kota Palu dengan jumlah ini berarti rasio ketersediaan penyuluh Agama Islam dibandingkan dengan jumlah penduduk Islam 1 : 5.788 artinya 1 orang penyuluh harus melayani 5.788 orang.

Untuk Pemeluk agama Kristen jumlah tenaga penyuluh hanya berasal dari Penyuluh Non PNS sebanyak 12 orang yang tersebar di seluruh Kota Palu dengan rasio ketersediaan penyuluh Agama Kristen dibandingkan dengan jumlah penduduk Kristen 1 : 3.197. Di lingkungan Katolik, penyuluh agama juga hanya berasal dari tenaga penyuluh non PNS Katolik berjumlah sebanyak 10 orang dengan rasio ketersediaan penyuluh Agama Katolik dibandingkan dengan jumlah penduduk Katolik 1



: 849. Saat ini tenaga penyuluh agama Hindu berstatus PNS sebanyak 1 orang, dan Penyuluh Non PNS agama Hindu berjumlah 6 orang dengan rasio ketersediaan penyuluh Agama Hindu dibandingkan dengan jumlah penduduk Hindu 1 : 1.075.

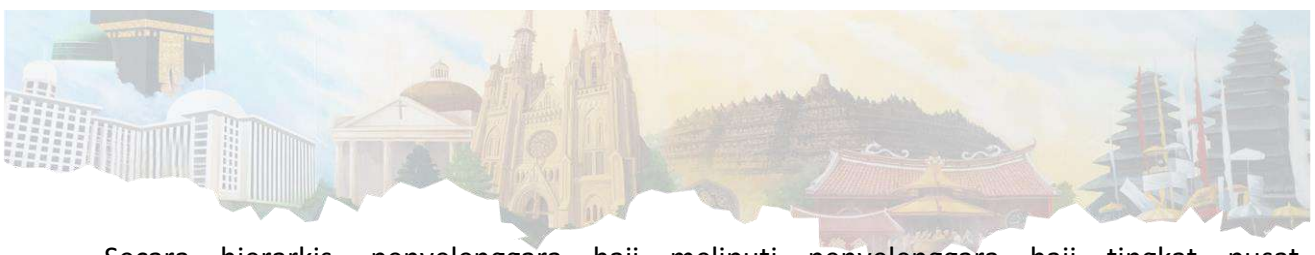
1.1.3.4 Penghulu yang Kompeten

Secara historis keberadaan penghulu tidak dapat dilepaskan dari dinamika kehidupan masyarakat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan secara menyeluruh. Perkembangan dan dinamika masyarakat sekaligus menjadi tenaga lapangan yang andal dalam menyukseskan visi dan misi Kementerian Agama khususnya di bidang pernikahan dan pembinaan keluarga sakinah menuju masyarakat bahagia sejahtera dan makmur berkat Ridha Allah SWT. Penghulu sebagai bagian dari pelayanan KUA yang bertugas dan bertatap muka langsung dengan masyarakat tentunya mempunyai kompetensi dibidang baca tulis Al-Quran, khotbah nikah, pembinaan keluarga sakinah, bimbingan perkawinan, dan memahami fikih munakahat.

Hingga tahun 2019 tercatat ada 10 penghulu yang tersebar di 8 KUA yang ada di Kota Palu. Jumlah penghulu yang ada masih terbilang kurang. Idealnya berdasarkan rasio jumlah peristiwa nikah dalam setiap kecamatan terdapat maksimal dua penghulu yang bertugas di KUA. Untuk mengisi kekurangan penghulu ini, Kantor Kementerian Agama Kota Palu ke depannya melakukan inpassing, yaitu memberikan pelatihan dan diklat kepada pegawai yang dianggap mampu menjadi penghulu, kemudian diberikan SK dan diangkat menjadi penghulu.

1.1.4 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Ibadah haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya. Menurut Pasal 9 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah disebutkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler dan Ibadah Umrah.



Secara hierarkis, penyelenggara haji meliputi penyelenggara haji tingkat pusat, penyelenggara haji tingkat provinsi, penyelenggara haji tingkat kabupaten atau kota, dan penyelenggara haji di Arab Saudi. Penyelenggara tingkat pusat dilaksanakan di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU). Penyelenggaraan haji tingkat provinsi dilaksanakan oleh Gubernur sebagai penanggung jawab dan koordinator, sedangkan pelaksanaan harian dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama setempat sebagai kepala staf penyelenggaraan ibadah haji provinsi, dan dibantu Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah sebagai sekretaris. Penyelenggaraan haji tingkat kabupaten atau kota dilaksanakan oleh bupati atau Walikota sebagai penanggung jawab dan koordinator, sedangkan pelaksanaan harian dilaksanakan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama setempat sebagai kepala staf penyelenggaraan ibadah haji kabupaten/kota, dan dibantu Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah sebagai sekretaris.

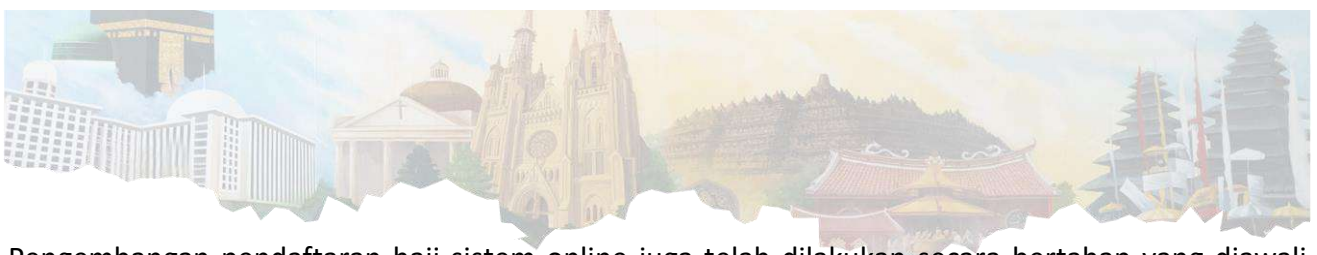
Jumlah keberangkatan jamaah haji selama tahun 2015-2019 adalah sebanyak 3.190 orang dengan jumlah antrean sampai tahun 2019 adalah sebanyak 123 orang. Adapun jumlah keberangkatan selama 5 tahun terakhir sebagai berikut.

Tabel 1.2

Jumlah Keberangkatan Haji Kota Palu

Tahun	Jumlah Keberangkatan (Orang)
2015	574
2016	501
2017	718
2018	686
2019	711

Kebijakan dalam proses pendaftaran haji yang telah dilakukan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota adalah dengan menerapkan prinsip *first come first served* berdasarkan urutan kacang sesuai perolehan nomor porsi berdasarkan alokasi kuota secara nasional maupun provinsi.



Pengembangan pendaftaran haji sistem online juga telah dilakukan secara bertahap yang diawali dengan memanfaatkan main sistem milik Garuda Indonesia sebagai host Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) yang tersambung dengan Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH, yang dimulai sejak tahun 1996.

Siskohat yang dibangun dan terhubung sampai tingkat kabupaten/kota telah memberikan kemudahan dan kecepatan layanan, pengendalian pendaftaran dan penyetoran lunas BPIH, pengendalian kuota haji nasional secara tersistem, dan upaya memberikan kepastian pergi haji pada tahun berjalan, serta adil secara berurutan untuk memperoleh nomor porsi haji. Pendaftaran haji melalui Siskohat dilakukan sepanjang tahun yang dapat dimonitor dan dikendalikan setiap saat secara real time.

1.1.5 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pembangunan Bidang Agama

Pencapaian atas tujuan peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel ditandai dengan tiga hal, yaitu: 1) meningkatnya hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja; 2) meningkatnya hasil penilaian Reformasi Birokrasi.

1.1.5.1 Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja

Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja ditujukan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil. Dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja, capaian output merupakan salah satu ukuran untuk menilai bagaimana setiap anggaran yang dikelola dipertanggungjawabkan. Hasil capaian output Kantor Kementerian Agama Kota Palu tahun 2015 s.d. 2019 adalah sebagai berikut:



Tabel 1.3

Hasil Capaian Output Kantor Kementerian Agama Kota Palu Tahun 2015-2019

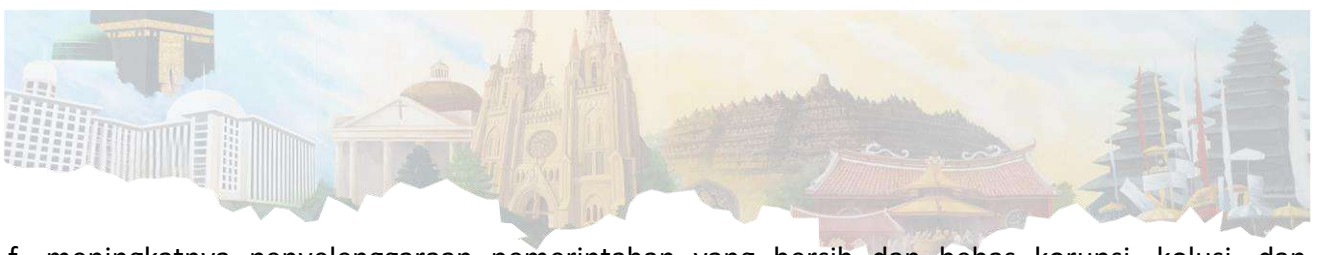
Tahun	Capaian Output
2015	91.55 %
2016	97.37 %
2017	95.50 %
2018	91.04 %
2019	98.49 %

Berdasarkan table di atas, realisasi capaian output Kantor Kementerian Agama Kota Palu selama tahun 2015-2019 telah mengalami peningkatan. Realisasi capaian output tertinggi terjadi di tahun 2019 sebesar 98.49%. Kantor Kementerian Agama Kota Palu berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran untuk tahun yang akan mendatang.

1.1.5.2 Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi terus mengalami peningkatan setiap tahunnya melalui perwujudan 8 (delapan) area perubahan yang ditetapkan yaitu:

- terciptanya birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi (pola pikir dan budaya kerja aparatur);
- terwujudnya organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing);
- terlaksananya sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efisien, efektif, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance;
- dihasilkannya regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif;
- terciptanya Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang berintegritas, kompeten, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera;



- f. meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- g. meningkatnya pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat; dan
- h. meningkatnya pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi terus mengalami peningkatan setiap tahunnya melalui perwujudan 8 (delapan) area perubahan yang ditetapkan dan ditandai dengan meningkatnya nilai PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi) Kantor Kementerian Agama Kota Palu tahun 2019 memperoleh skor 40,08% dan di tahun 2019 meningkat di angka 81,13%. Hal yang perlu dipahami bahwasanya bagian terpenting dalam pengukuran ketercapaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi yaitu cara penilaian yang dilakukan adalah menguantifikasi kualitas ketercapaian, sehingga output yang dihasilkan adalah kualitas dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan bukan kuantitas (jumlah) output yang dihasilkan. Sehingga pada akhirnya, penilaian reformasi birokrasi tidak hanya sekedar formalitas *“evidence based”* melainkan *“impact based”*.

Indikator keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak lepas dari pengejawantahan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Hukum dan Perundangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penguatan Tata laksana, Penataan Sistem SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Nilai indikator dari 8 (delapan) area perubahan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan seiring dengan semakin baiknya sistem tata Kelola pemerintahan di Kantor Kementerian Agama Kota Palu.



1.1.6 Peningkatan Akses Layanan Pendidikan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Sejalan dengan amanat Undang-Undang tersebut, Kantor Kementerian Agama Kota Palu berupaya untuk terus membuka akses pendidikan bagi seluruh masyarakat khususnya di Kota Palu, baik melalui lembaga pendidikan umum berciri khas agama maupun lembaga pendidikan keagamaan yang menjadi mitra Kementerian Agama, sedang indikator dari sasaran tersebut antara lain: 1) APK RA/ Pratama Widya Pasraman; 2) APK MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman; 3) APK MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman; 4) APK MA/Ulya/Utama Widya Pasraman; 5) APM MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman; 6) APM MTs/Wustha/SMPTK; 7) APM MA/Ulya/Utama Widya Pasraman.

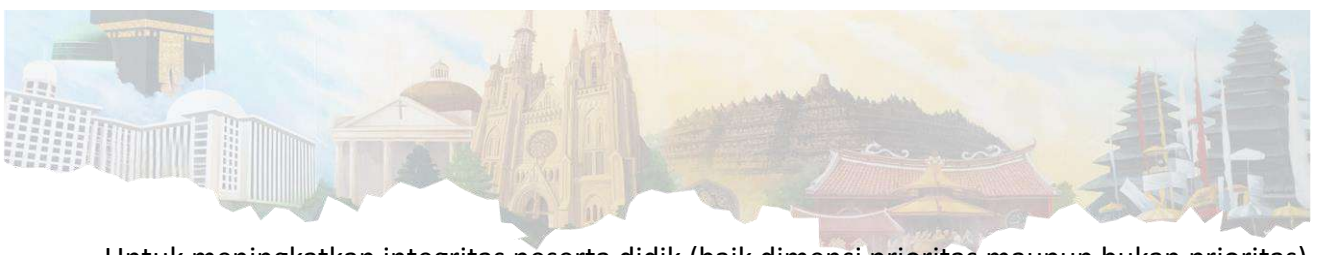
Tabel 1.4

Peta pendidikan pada Kemenag Tahun 2019

No	Lembaga Pendidikan	Jumlah Lembaga	Jumlah Peserta Didik
1	RA	16	459
2	MI	20	3,448
3	MTs	25	4,873
4	MA	11	2,838

1.1.7 Peningkatan Mutu Pendidikan Agama dan Keagamaan

Dalam rangka mengevaluasi kualitas pembelajaran pada lembaga pendidikan umum berciri khas agama, penyelenggaraan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, Kantor Kementerian Agama Kota Palu berupaya konsisten dalam mengawal penyelenggaraan evaluasi proses pembelajaran di madrasah maupun penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah-sekolah umum melalui Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Pendidikan Agama.



Untuk meningkatkan integritas peserta didik (baik dimensi prioritas maupun bukan prioritas) diperlukan sinergitas antar atrilogi pusat pendidikan, yaitu: keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiga pusat pendidikan tersebut harus sejalan, seirama, senafas, dan sewarna dengan bingkai pembiasaan dan keteladanan. Pengembangan integritas peserta didik di madrasah dan lembaga pendidikan keagamaan dilakukan oleh satuan pendidikan, khususnya oleh kepala satuan pendidikan yang secara terus menerus dan berkesinambungan mengeluarkan kebijakan yang dapat menumbuh kembangkan perilaku integritas, misalnya: dengan menekan perilaku menyontek dengan membuat slogan: "kerja mandiri itu menyenangkan", "menyontek itu tidak asyik", dan "cari bocoran tidak asyik".

Peningkatan integritas siswa dilakukan oleh guru-guru, khususnya guru agama melalui keteladanan. Selain itu, guru membuat "buku siswa" yang ditandatangani oleh orang tua untuk tugas-tugas keagamaan. Peningkatan integritas peserta didik juga harus melibatkan keteladanan orang tua di rumah. Orang tua harus berkomunikasi dengan guru untuk memantau kegiatan peserta didik dalam kegiatan sehari-hari.

1.2 Potensi Permasalahan

Berdasarkan hasil evaluasi capaian-capaian di atas dan menelaah kondisi strategis saat ini, telah diidentifikasi berbagai potensi dan permasalahan yang bisa memengaruhi hasil capaian yang lebih baik. Potensi yang diidentifikasi dapat dijadikan modal dasar untuk mendukung capaian Renstra yang akan datang, dan permasalahan untuk diatasi. Berikut merupakan sejumlah potensi dan permasalahan yang akan dihadapi oleh Kantor Kantor Kementerian Agama Kota Palu pada masa-masa mendatang.

1.2.1 Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengalaman Ajaran Agama

Dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan umat beragama ada beberapa potensi, tantangan, kelemahan dan ancaman/masalah yang dimiliki dengan rincian sebagai berikut:



No	Potensi/Kekuatan	Tantangan	Kelemahan	Ancaman/Masalah
1	Peran yang telah dilakukan oleh penyuluh agama sebagai ujung tombak dalam peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama cukup efektif sehingga menjadi modal yang luar biasa selama ini	Akhir-akhir ini telah bermunculan berbagai platform digital untuk pembelajaran jarak jauh (on-line) menjadi tantangan yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif metode penyuluhan, yang diterapkan guna menjangkau umat lebih banyak, terutama kaum milenial	Metode penyuluhan yang dilakukan selama ini masih konvensional, mengandalkan pertemuan tatap muka yang membatasi cakupan kelompok sasaran penyuluhan yang mudah dijangkau	Rendahnya kompetensi penyuluh agama dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk dalam menggunakan platform digital. Kelemahan dalam kompetensi pedagogik dan metode inovasi penyuluhan oleh para penyuluh agama ini dapat menyebabkan ketertinggalan dalam menangkap ceruk pasar dakwah keagamaan atau bahkan dapat berakibat pada penyampaian materi yang tidak otoritatif dan tidak maksimal
2	Pembiasaan nilai kesalehan di lingkungan keluarga terbukti memberi pengaruh yang tinggi, sehingga perlu pelestarian tradisi yang dicontohkan oleh kedua orang tua terhadap anak-anak sejak dini, seperti ibadah, literasi kitab suci dan silaturahmi antar sesama	Penyuluhan agama diarahkan pada kepedulian sosial, penguatan relasi antar manusia berbeda SARA, etika di ruang publik, pelestarian lingkungan, dan kepatuhan pada negara pemerintah	Arah pembinaan masih fokus pada ritual keagamaan. Materi penyuluhan kesalehan sosial belum banyak menjadi fokus penyuluhan agama	Materi penyuluhan dengan nilai kesalehan sosial yang tidak seimbang akan menyebabkan konten dakwah keagamaan yang kering dan tidak sesuai dengan semangat zaman
3	Selain penyuluh agama, penyebaran pesan-pesan keagamaan oleh para tokoh agama, rohaniawan, dan tokoh-tokoh masyarakat memberikan kontribusi yang berarti. Kondisi faktual ini dapat menjadi alternatif dalam mengatasi kekurangan jumlah penyuluh agama	Berkembangnya berbagai media sosial seperti TV, instagram, internet, e-koran, memberikan peluang untuk pengembangan jalur media komunikasi yang dapat dimanfaatkan untuk percepatan, perluasan jangkauan, dan promosi pesan-pesan keagamaan, tak terkecuali hingga di daerah 3 T	Belum adanya sistem pengendalian dan monitoring dalam penyiaran pesan-pesan keagamaan sehingga apabila terjadi penyimpangan dapat diatasi sejak dini	Belum adanya standar kompetensi yang ditetapkan bagi rohaniawan dan tokoh-tokoh agama dapat berakibat pada rendahnya kualitas konten pesan keagamaan, yang selanjutnya berakibat kepada pendangkalan dalam pemahaman keagamaan di kalangan sebagian umat beragama



No	Potensi/Kekuatan	Tantangan	Kelemahan	Ancaman/Masalah
4	Kegiatan keagamaan meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama. Perhatian Pemerintah sangat tinggi dalam penyelenggaraan kegiatan keagamaan ditunjukkan pada penyelenggaraan kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Beragam kegiatan keagamaan yang lahir dan berkembang di masyarakat dapat menjadi instrumen untuk membangun jalinan interaksi sesama anak bangsa serta meneguhkan sikap toleransi intra dan antar umat beragama. Melalui sarana tersebut turut pula memupuk dan memperkuat solidaritas kolektif di lingkungan masyarakat, selain dapat pula menjadi ajang kompetitif yang memunculkan semangat sportivitas	Adanya kegiatan keagamaan yang kadang-kadang disalahgunakan untuk kepentingan lain termasuk kepentingan politik. Kegiatan keagamaan yang melibatkan umat secara massal yang kurang terkendali dapat menimbulkan konflik atau kerusakan tatanan sosial	Masih ada kegiatan keagamaan yang mengarah kepada penyimpangan dan konservatisme ajaran agama yang mengarah kepada eksklusivisme dan esktrimisme beragama

1.2.2 Pengukenan Suasana Kerukunan Hidup Umat Beragama yang Harmonis

Potensi, tantangan, kelemahan dan ancaman/masalah yang mendukung pengukenan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis di Kota Palu sebagai berikut:

No	Potensi/Kekuatan	Tantangan	Kelemahan	Ancaman/Masalah
1	Sudah adanya dasar hukum pada tingkat implementasi dalam bentuk Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan FKUB dan Pendirian Rumah Ibadah	Kedudukan hukum PBM belum mengikat Pemda, sehingga peningkatan status hukum PBM menjadi Perpres menjadi hal penting dalam usaha pemberdayaan FKUB	Belum semua amanat PBM dilaksanakan secara optimal, khususnya terkait kebijakan anggaran kerukunan umat beragama; sementara itu kasus konflik dan intoleransi serta ketidakrukunan hidup beragama banyak terjadi pada tingkat lokal	Pemahaman yang dangkal tentang peraturan perundangan tentang kerukunan beragama, yang disertai asumsi atau pra pemahaman yang sempit dikhawatirkan dapat mengarah kepada pemicu konflik, terutama bagi para personal di lingkungan aktor beragama atau pemerintahan



No	Potensi/Kekuatan	Tantangan	Kelemahan	Ancaman/Masalah
2	Karakteristik masyarakat Sulawesi Tengah yang bersifat multikultural, berpotensi memunculkan permasalahan yang disebabkan oleh gesekan yang berlatar belakang SARA	Respon penanganan konflik dan ketidakrukunan baik yang bersifat intern maupun ekstern antar umat beragama secara komprehensif, sinergis, bersatupadu, cepat, dan berkesinambungan, belum dapat dilaksanakan secara maksimal	Rumah ibadah sebagai tempat penyiaran agama dan tempat melakukan ibadah. Fungsi rumah ibadah di samping sebagai tempat peribadahan memberikan dorongan yang kuat dan terarah bagi jemaahnya, agar kehidupan spiritual keberagaman bagi pemeluk agama tersebut menjadi lebih baik	Rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran dan ramah (anak, distabilitas, lansia)
3	Pelayanan kehidupan beragama menjadi bagian dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sampai tingkat kecamatan dan berkelanjutan. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan di tingkat kecamatan, telah dibangun KUA di Kota Palu. Pelayanan keagamaan pada KUA sebagian besar berkaitan dengan pencatatan nikah di samping tugas lainnya	Perkembangan digitalisasi berpotensi untuk dimanfaatkan dalam mendukung pelayanan keagamaan di KUA	Anggaran pendukung operasional KUA Kecamatan belum optimal dan kualitas sumber daya manusia	Ada 4 KUA belum memiliki gedung sendiri sehingga pelayanan KUA di gedung tersebut belum berjalan optimal. Kualitas Sumber daya manusia pendukungnya terbatas

1.2.3 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Potensi, tantangan, kelemahan dan ancaman/masalah yang mendukung peningkatan kualitas layanan ibadah haji dan umrah di Kota Palu sebagai berikut:

No	Potensi/Kekuatan	Tantangan	Kelemahan	Ancaman/Masalah
1	Pendaftaran calon jemaah haji semakin meningkat. Melalui Siskohat, sistem pendaftaran dan pelaporan haji terpadu sangat intensif	Tahap-tahap persiapan dapat berupa pengadaan dokumen paspor bagi jemaah haji, cek kesehatan, dan bimbingan ibadah bagi calon jemaah haji,	Integrasi rekam kesehatan jemaah dengan sistem aplikasi informasi terpadu masih perlu ditingkatkan	Kuota haji yang tersedia relatif stagnan sehingga memperpanjang waktu tunggu keberangkatan calon jemaah haji.



No	Potensi/Kekuatan	Tantangan	Kelemahan	Ancaman/Masalah
		adanya persiapan dari masing-masing jamaah haji diharapkan pada saat keberangkatan memiliki kesiapan yang lebih maksimal		Upaya untuk meningkatkan kuota telah dilakukan terus menerus akan tetapi hasil yang diperoleh terbatas
2	Tingginya antusiasme masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji menjadikan masyarakat antusias dalam mencari informasi yang berkaitan dengan ibadah haji	Perbedaan kondisi Indonesia dengan Arab Saudi sering kali menjadi permasalahan yang tidak terduga, sehingga perlu penanganan yang spesifik dan cepat tanggap	Petugas haji belum maksimal dibekali dengan kemampuan manajemen tanggap darurat	Pembekalan petugas haji masih dilakukan secara konvensional
3	Bimbingan manasik haji kepada calon jemaah haji dan umrah sudah dilakukan secara intensif	Bimbingan manasik haji dilakukan melalui teknologi dan informasi	Pembinaan pasca pelaksanaan haji dan umrah belum diprogramkan untuk mempertahankan kualitas pengamalan ajaran agama secara berkesinambungan	Pembinaan pasca pemulangan haji belum dilakukan mengingat keterbatasan alokasi dan petugas
4	Adanya peningkatan biro penyelenggaraan haji dan umrah yang siap memfasilitasi jemaah dalam persiapan dan pelaksanaan proses ibadah haji dan umrah	Peningkatan kualitas layanan ibadah haji dan umrah di Arab Saudi diperlukan dengan membentuk Kantor Pelayanan Terpadu	Sistem pengendalian dan pengawasan biro penyelenggaraan ibadah haji dan umrah belum terintegrasi dalam satu aplikasi	Masih banyak biro penyelenggara ibadah haji dan umrah yang curang sehingga banyak masyarakat yang menjadi korban

1.2.4 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pembangunan Bidang Agama

Potensi, tantangan, kelemahan dan ancaman/masalah yang mendukung kualitas tata kelola pembangunan bidang agama di Kota Palu sebagai berikut:

No	Potensi/Kekuatan	Tantangan	Kelemahan	Ancaman/Masalah
1	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada satuan kerja sudah berjalan cukup baik	Ada 7 Satker di lingkup Kantor Kementerian Agama Kota Palu yang perlu pengawasan intensif	Sistem komunikasi dan koordinasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang tepat belum diformulasikan	Proses koordinasi Reformasi Birokrasi belum diikuti keterlibatan pimpinan secara komprehensif



No	Potensi/Kekuatan	Tantangan	Kelemahan	Ancaman/Masalah
2	Dalam pengelolaan keuangan negara, Kementerian Agama sudah mencapai opini WTP terhadap LKKA dari tahun 2016-2018	Potensi PNBPN yang sangat besar, termasuk pengelolaan asrama haji, pendidikan, dan jaminan produk halal, belum dapat digali secara optimal	Pengelolaan aset BMN belum tertib dalam menginventarisasi barang	Sebagian aset hak milik masih diakui oleh pihak lain, dan lambannya proses alih status kepemilikan
3	Penerapan zona integritas dan budaya kinerja yang semakin baik merupakan wujud keberhasilan pelaksanaan RB di lingkungan Kemenag Kota Palu	Manajemen kinerja dan merit sistem yang selaras antara Pusat hingga Daerah dilakukan dalam upaya perbaikan kinerja	Belum memiliki strategi komprehensif dalam penerapan nilai-nilai budaya kinerja	Belum maksimal upaya yang dilakukan untuk mendorong perubahan secara nyata penerapan budaya kinerja

1.2.5 Peningkatan Akses Layanan Pendidikan

Potensi, tantangan, kelemahan dan ancaman/masalah yang mendukung akses layanan pendidikan di Kota Palu sebagai berikut:

No	Potensi/Kekuatan	Tantangan	Kelemahan	Ancaman/Masalah
1	Penerapan kurikulum 2013 merintis pelaksanaan pembelajaran yang meningkatkan kemampuan berpikir	Metode pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan berpikir dapat diterapkan tanpa merubah kurikulum yang berlaku	Kurikulum 2013 belum berhasil meningkatkan kemampuan berpikir (nilai UN bahkan menurun)	Kemampuan berpikir tingkat tinggi adalah salah satu kemampuan yang diperlukan abad ke-21, apabila tidak dikembangkan akan sangat memengaruhi kualitas angkatan kerja
2	Mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti telah memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas pemahaman agama, sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam peraturan perundangan	Moderasi beragama belum menjadi fokus pembelajaran pendidikan agama	Pelajaran agama belum sepenuhnya memberikan kontribusi dalam memperkuat moderasi beragama	Belum lengkapnya pengaturan pendidikan agama dalam PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (hanya 7 pasal). Di samping itu, belum terpenuhinya guru pendidikan agama yang kompeten, manajemen guru agama yang tidak berada satu naungan instansi



No	Potensi/Kekuatan	Tantangan	Kelemahan	Ancaman/Masalah
3	Perluasan cakupan mata pelajaran agama ditambah dengan “budi pekerti” dimaksudkan untuk meningkatkan karakter dan etika peserta didik melalui pelajaran agama	Peningkatan kualitas karakter siswa difokuskan pada 18 jenis karakter nasional dan kepeloporan, serta penciptaan kondisi budaya belajar di lingkungan satuan pendidikan	Muatan pendidikan agama masih fokus pada pembelajaran agama, maka hasil pendidikan karakter belum optimal	Pendidikan karakter belum diintegrasikan dalam kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan
4	Pendidikan umum berciri khas agama dan pendidikan keagamaan telah membantu penuntasan Wajar Dikdas 12 Tahun dan menjangkau peserta didik dari keluarga miskin	Pemerintah menjamin akses di tingkat Wajar Dikdas 12 Tahun dengan BOS dan KIP	Kenaikan APK belum diikuti dengan peningkatan mutunya. Masih banyaknya satuan pendidikan yang belum optimal dalam meningkatkan mutunya	Akses pendidikan yang berkualitas memberikan kontribusi dalam pengukuran IPM

1.2.6 Peningkatan Mutu Pendidikan Agama dan Keagamaan

Potensi, tantangan, kelemahan dan ancaman/masalah yang mendukung peningkatan mutu pendidikan agama dan keagamaan di Kota Palu sebagai berikut:

No	Potensi/Kekuatan	Tantangan	Kelemahan	Ancaman/Masalah
1	Melalui madrasah dan pendidikan keagamaan telah menjangkau semua lapisan masyarakat, umat beragama dapat: mengidentifikasi identitas budaya; menempuh pendidikan; mendalami ajaran agama; meretas jalan kultural yang mendorong proses mobilitas sosial; dan menghasilkan sarjana agama yang telah berperan dalam pembangunan melalui berbagai profesi	Diversifikasi akses memperoleh pendidikan yang berkualitas melalui berbagai model kelembagaan dan pembelajaran	Sebagian besar madrasah dan pendidikan keagamaan adalah swasta yang kualitas guru dan sarana prasarannya belum memadai	Kualitas guru dan sarana prasarana yang belum optimal dan sebagian masih didukung oleh guru Non PNS dan persebaran guru PNS yang belum merata



No	Potensi/Kekuatan	Tantangan	Kelemahan	Ancaman/Masalah
2	Pemerintah telah memberikan BOS, yang menjamin satuan pendidikan memperoleh anggaran untuk membiayai operasional dan peningkatan mutu pendidikan. Melalui PIP, telah disalurkan bantuan afirmasi kepada peserta didik yang kurang mampu dan ini telah berhasil mempertahankan peserta didik tidak putus sekolah	Pemberian bantuan operasional pendidikan (BOS), bantuan bagi anak kurang mampu (KIP), daerah afirmasi, dan siswa berbakat, secara merata dan tepat sasaran	Bagi sebagian satuan pendidikan, jumlah dana BOS belum mencukupi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jumlah dana PIP yang tersedia belum sebanding dengan jumlah peserta didik yang membutuhkan di lapangan karena belum sinkronnya data DTKS dengan data pendidikan di Kementerian Agama	Proporsi dana BOS yang disediakan hanya mencukupi sebesar 30% dari total kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Penyaluran PIP sebagian besar dilakukan oleh Pusat sehingga proses distribusinya membutuhkan waktu yang lama
3	Perluasan cakupan mata pelajaran agama ditambah dengan “budi pekerti” dimaksudkan untuk meningkatkan karakter dan etika peserta didik melalui pelajaran agama	Peningkatan kualitas karakter siswa difokuskan pada 18 jenis karakter nasional dan kepeloporan, serta penciptaan kondisi budaya belajar di lingkungan satuan pendidikan	Muatan pendidikan agama masih fokus pada pembelajaran agama, maka hasil pendidikan karakter belum optimal	Pendidikan karakter belum diintegrasikan dalam kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan
4	Pendidikan umum berciri khas agama dan pendidikan keagamaan telah membantu penuntasan Wajar Dikdas 12 Tahun dan menjangkau peserta didik dari keluarga miskin	Pemerintah menjamin akses di tingkat Wajar Dikdas 12 Tahun dengan BOS dan KIP	Kenaikan APK belum diikuti dengan peningkatan mutunya. Masih banyaknya satuan pendidikan yang belum optimal dalam meningkatkan mutunya	Akses pendidikan yang berkualitas memberikan kontribusi dalam pengukuran IPM

The background is a vibrant green with a low-poly, geometric pattern. A white, irregularly shaped area in the center contains the text.

BAB

2

*Tujuan dan
Sasaran*



BAB II

Tujuan Dan Sasaran

2.1 Tujuan Kementerian Agama

Kantor Kementerian Agama Kota Palu merupakan salah satu instansi pemerintah yang bersifat vertikal. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003, Kantor Kementerian Agama Kota Palu mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah Kota Palu berdasarkan Kebijakan Menteri Agama dan peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai Misi Kementerian Agama ditetapkan tujuan sebagai berikut:

- Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah;
- Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
- Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;
- Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan berkualitas;
- Peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif; dan
- Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif.

Kantor Kementerian Agama Kota Palu mendukung pelaksanaan lima dari enam tujuan Kementerian Agama di atas.

2.2 Sasaran Kegiatan Kantor Kementerian Agama Kota Palu

Untuk mencapai tujuan Kementerian Agama ditetapkan sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan. Kementerian Agama menetapkan 13 sasaran strategis dalam rangka mencapai



6 (enam) tujuan. Sedangkan Kantor Kementerian Agama Kota Palu mendukung 12 Sasaran Strategis dari 5 (lima) tujuan yang dijalankan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam rangka mencapai 5 (lima) tujuan tersebut, Kantor Kementerian Agama Kota Palu menetapkan Sasaran Kegiatan yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai Kantor Kementerian Agama Kota Palu pada tahun 2024. Adapun Sasaran Kegiatan yang mendukung dan bersesuaian dengan Tujuan, Sasaran Strategis dan Sasaran Program sebagaimana tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kota Palu adalah sebagai berikut:

Tujuan 1 : Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial dicapai dengan menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
SS1	Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama	Indeks Kesalehan Umat beragama

Tujuan 2 : Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama dicapai dengan menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
SS2	Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama	Indeks Kerukunan Umat beragama
SS3	Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya	Tingkat Penerimaan umat beragama atas keragaman budaya

Tujuan 3 : Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan dicapai dengan menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:



Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
SS4	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama	Indeks Kepuasan Layanan KUA
		Indeks Kepuasan Layanan Haji
SS5	Meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat	Persentase peningkatan dana sosial keagamaan untuk mendukung layanan Pendidikan dan Keagamaan

Tujuan 4 : Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas, dengan menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
SS6	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran	Persentase anak di atas batas kompetensi minimal dalam test AKSI
		Persentase anak di atas standar kompetensi minimum dalam test PISA
SS7	Meningkatnya kualitas pemerataan akses pendidikan	APK RA/Pratama/Widya Pasraman/Taman Semari/Nava Dhammasekha
		APK MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman
		APK MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman
		APK MA/Ulya/SMTK//Utama Widya Pasraman
		APM MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman
		APM MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman



Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
		APM MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman
SS8	Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik	Indeks rasio Guru yang memenuhi SNP antar Provinsi
SS9	Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan	Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang terakreditasi B
		Persentase MTs/Wustha/SMPTK /Madyama Widya Pasraman yang terakreditasi B
		Persentase MA/Ulya/SMTK/SMAK /Utama Widya Pasraman yang terakreditasi B
SS10	Meningkatnya tata kelola pendidikan	Persentase RA/Pratama/Widya Pasraman/Taman Semari/Nava Dhammasekha yang sesuai SPMI
		Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang sesuai SPMI
		Persentase MTs/Wustha/SMPTK /Madyama Widya Pasraman yang sesuai SPMI
		Persentase MA/Ulya/SMTK//Utama Widya Pasraman yang sesuai SPMI
SS11	Meningkatnya kualitas mental/karakter siswa	Indeks Karakter Siswa

Tujuan 5 : Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif dicapai dengan menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
SS12	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel	Predikat opini laporan keuangan
		Nilai reformasi birokrasi



BAB

3

*Target Kinerja
dan
Kerangka Pendanaan*



BAB III

Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

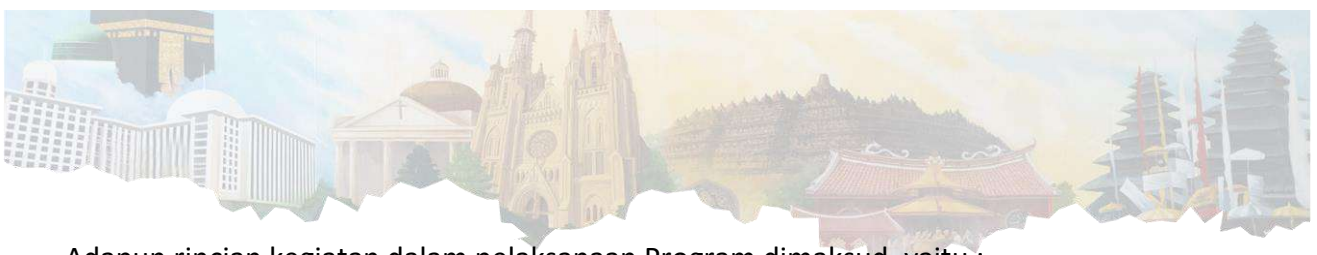
3.1 Target Kinerja

Dalam rangka mencapai Sasaran Strategis Kementerian Agama, telah ditetapkan beberapa Program di Kantor Kementerian Agama Kota Palu, yaitu sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama
2. Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah
3. Program Pendidikan Islam
4. Program Bimbingan Masyarakat Islam
5. Program Bimbingan Masyarakat Kristen
6. Program Bimbingan Masyarakat Katolik
7. Program Bimbingan Masyarakat Hindu
8. Program Kerukunan Umat Beragama

Untuk tahun 2021, Kantor Kementerian Agama Kota Palu menjalankan arah kebijakan tersebut melalui program yang sudah disederhanakan menjadi 4 (empat) program, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen
2. Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama
3. Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
4. Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun



Adapun rincian kegiatan dalam pelaksanaan Program dimaksud, yaitu :

1. Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN
2. Pembinaan Administrasi Kepegawaian
3. Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN
4. Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana
5. Pembinaan Administrasi Perencanaan
6. Pembinaan Administrasi Umum
7. Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan
8. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya penyelenggaraan haji dan umrah
9. Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam
10. Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam
11. Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen
12. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen
13. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik
14. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik
15. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu
16. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu
17. Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama
18. Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah
19. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf
20. Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam
21. Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
22. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen



23. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik
24. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu
25. Pembinaan Umrah dan Haji Khusus
26. Pelayanan Haji Dalam Negeri
27. Pembinaan Haji
28. Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu
29. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Madrasah
30. Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah
31. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam
32. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam
33. Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Kristen
34. Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Katolik
35. Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Hindu
36. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah
37. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Keagamaan Islam
38. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen
39. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik
40. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu

Selanjutnya untuk mendukung tercapainya keberhasilan program dan kegiatan tersebut maka telah ditetapkan Sasaran Kegiatan yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Kantor Kementerian Agama Kota Palu dalam 5 (lima) tahun ke depan yang dirincikan dalam Lampiran II Matriks Kinerja dan Pendanaan.



3.2 Kerangka Pendanaan

Upaya untuk mencapai tujuan, sasaran dan program beserta kegiatan pada Kantor Kementerian Agama Kota Palu yang telah ditetapkan memerlukan dukungan berbagai sumber daya, terutama dukungan pendanaan yang memadai. Sumber pendanaan berasal dari pemerintah baik dari pusat maupun daerah serta masyarakat. Sumber pendanaan yang sekarang ini sudah berjalan adalah dari Rupiah Murni, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Hibah Langsung Dalam Negeri dan Sumber Pembiayaan lainnya yang tidak mengikat. Kerangka pendanaan dalam Renstra Kantor Kementerian Agama Kota Palu tahun 2020 sampai dengan 2024 menjadi acuan dalam perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan untuk menunjang implementasi program dan kegiatan Kantor Kementerian Agama Kota Palu berbasis Renstra, serta berdasarkan kaidah-kaidah yang ditetapkan dalam sistem pengelolaan pendanaan nasional.

Adapun rencana pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan Kantor Kementerian Agama Kota Palu sampai dengan 2024 melalui sumber pembiayaan APBN pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Rencana Pendanaan 8 Program Tahun 2020-2024

Program/Kegiatan	Kebutuhan Dana (Rp.000)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	3,917,000	4,349,000	4,517,000	4,668,000	4,797,000
Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN	-	-	-	-	-
Pembinaan Administrasi Kepegawaian	-	-	37,000	39,000	41,000
Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN	2,996,000	2,996,000	3,052,000	3,107,000	3,159,000



Program/Kegiatan	Kebutuhan Dana (Rp.000)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana	-	-	-	-	-
Pembinaan Administrasi Perencanaan	-	10,000	20,000	25,000	30,000
Pembinaan Administrasi Umum	921,000	1,343,000	1,393,000	1,477,000	1,542,000
Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan	-	-	15,000	20,000	25,000
Program Kerukunan Umat Beragama	30,000	60,000	260,000	290,000	320,000
Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama	30,000	60,000	260,000	290,000	320,000
Program Bimbingan Masyarakat Islam	10,083,000	11,143,000	12,953,000	14,030,000	15,950,000
Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	675,000	675,000	1,200,000	1,200,000	2,000,000
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf	5,000	5,000	55,000	60,000	65,000
Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	400,000	460,000	685,000	750,000	860,000
Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	3,000	3,000	13,000	20,000	25,000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam	9,000,000	10,000,000	11,000,000	12,000,000	13,000,000
Program Pendidikan Islam	70,561,000	72,061,000	74,635,000	76,007,000	77,628,000
Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam	8,948,000	9,216,000	9,932,000	10,021,000	10,469,000
Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam	195,000	200,000	201,000	205,000	210,000
Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah	5,161,000	5,264,000	5,677,000	5,831,000	6,193,000



Program/Kegiatan	Kebutuhan Dana (Rp.000)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	24,360,000	24,847,000	25,334,000	25,821,000	26,308,000
Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	31,897,000	32,534,000	33,491,000	34,129,000	34,448,000
Program Bimbingan Masyarakat Kristen	6,758,000	6,857,000	8,662,000	8,663,000	8,663,000
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen	126,000	162,000	340,000	340,000	340,000
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen	72,000	164,000	901,000	901,000	901,000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen	23,000	-	-	-	-
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen	6,537,000	6,531,000	7,421,000	7,422,000	7,422,000
Program Bimbingan Masyarakat Katolik	1,701,000	1,871,000	2,057,000	2,263,000	2,490,000
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik	215,000	237,000	260,000	286,000	315,000
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik	450,000	495,000	544,000	598,000	658,000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik	600,000	660,000	726,000	799,000	879,000
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik	436,000	479,000	527,000	580,000	638,000
Program Bimbingan Masyarakat Hindu	307,000	999,000	1,049,000	1,101,000	1,156,000
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu	-	-	-	-	-
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu	-	-	-	-	-
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu	307,000	284,000	298,000	313,000	329,000



Program/Kegiatan	Kebutuhan Dana (Rp.000)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu	-	715,000	751,000	788,000	827,000
Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah	1,291,000	1,340,000	1,405,000	1,440,000	1,500,000
Pelayanan Haji Dalam Negeri	12,000	15,000	20,000	25,000	30,000
Pembinaan Haji	78,000	55,000	60,000	65,000	70,000
Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Dana Haji Terpadu	-	-	-	-	-
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah	1,201,000	1,270,000	1,325,000	1,350,000	1,400,000

Tabel 3.2

Rencana Pendanaan 4 Program Tahun 2020-2024

Program/Kegiatan	Kebutuhan Dana (Rp.000)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Program Dukungan Manajemen	53,918,000	56,822,000	60,101,000	62,092,000	63,780,000
Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN	-	-	-	-	-
Pembinaan Administrasi Kepegawaian	-	-	25,000	26,000	27,000
Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN	2,996,000	2,996,000	3,052,000	3,107,000	3,159,000
Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana	-	-	-	-	-
Pembinaan Administrasi Perencanaan	-	10,000	25,000	26,000	27,000
Pembinaan Administrasi Umum	921,000	1,343,000	1,410,000	1,495,000	1,561,000



Program/Kegiatan	Kebutuhan Dana (Rp.000)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan	-	-	50,000	57,000	63,000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam	9,000,000	10,000,000	11,000,000	12,000,000	13,000,000
Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	31,897,000	32,534,000	33,491,000	34,129,000	34,448,000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen	23,000	-	-	-	-
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen	6,537,000	6,531,000	7,421,000	7,422,000	7,422,000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik	600,000	660,000	726,000	799,000	879,000
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik	436,000	479,000	527,000	580,000	638,000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu	307,000	284,000	298,000	313,000	329,000
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu	-	715,000	751,000	788,000	827,000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah	1,201,000	1,270,000	1,325,000	1,350,000	1,400,000
Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	1,725,000	1,932,000	3,613,000	3,772,000	4,778,000
Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama	30,000	60,000	135,000	153,000	169,000
Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	675,000	675,000	1,200,000	1,200,000	2,000,000
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf	5,000	5,000	55,000	60,000	65,000
Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	400,000	460,000	685,000	750,000	860,000
Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	3,000	3,000	13,000	20,000	25,000



Program/Kegiatan	Kebutuhan Dana (Rp.000)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pelayanan Haji Dalam Negeri	72,000	164,000	901,000	901,000	901,000
Pembinaan Haji	450,000	495,000	544,000	598,000	658,000
Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji	-	-	-	-	-
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen	12,000	15,000	20,000	25,000	30,000
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik	78,000	55,000	60,000	65,000	70,000
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu	-	-	-	-	-
Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	33,434,000	34,225,000	35,606,000	36,182,000	37,117,000
Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Madrasah	-	-	-	-	-
Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	24,360,000	24,847,000	25,334,000	25,821,000	26,308,000
Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam	-	-	-	-	-
Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam	8,948,000	9,216,000	9,932,000	10,021,000	10,469,000
Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Kristen	126,000	162,000	340,000	340,000	340,000
Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Katolik	-	-	-	-	-
Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Hindu	-	-	-	-	-
Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	5,571,000	5,701,000	6,378,000	6,562,000	6,958,000
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah	5,161,000	5,264,000	5,677,000	5,831,000	6,193,000



Program/Kegiatan	Kebutuhan Dana (Rp.000)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Keagamaan Islam	195,000	200,000	201,000	205,000	210,000
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen	-	-	240,000	240,000	240,000
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik	215,000	237,000	260,000	286,000	315,000
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu	-	-	-	-	-



BAB

4

Penutup





BAB IV

Penutup

Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kota Palu tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari Renstra Kementerian Agama RI Tahun 2020-2024. Renstra ini memuat evaluasi Renstra tahun 2015-2019, tujuan, sasaran, target serta kerangka pendanaan yang direncanakan untuk lima tahun yang akan datang. Renstra Kantor Kementerian Agama Kota Palu dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), RKA K/L hingga penetapan Perjanjian Kinerja maupun Sasaran Kinerja Pegawai.

Dalam implementasinya, setiap upaya yang akan dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Palu selama lima tahun mendatang harus mengarah pada terpenuhinya target capaian yang tertuang dalam Renstra ini. Sehingga, kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Palu diharapkan dapat lebih terukur dan terevaluasi dengan baik. Selain itu, dengan mengacu pada Renstra ini, maka kontribusi Kantor Kementerian Agama Kota Palu dalam mewujudkan Pembangunan di Bidang Agama akan sejalan dengan target dari Kementerian Agama RI. Komitmen dari semua pihak diharapkan dapat menjadi sebab tercapainya target dalam Renstra ini yang dapat menggambarkan peningkatan kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Palu.

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Palu



H. Nasruddin L. Midu



Lampiran 7

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN 5 PROGRAM



Lampiran I

Matriks Kinerja dan Pendanaan 5 Program

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
2098-Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN								-	-	-	-	-	Subbag Tata Usaha
SK.1.2098.1	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum												
IKSK.1.2098.1.1	Persentase produk hukum yang diharmonisasikan	%											
IKSK.1.2098.1.2	Persentase produk hukum yang diterbitkan	%											
IKSK.1.2098.1.3	Persentase kasus hukum yang terselesaikan	%											
IKSK.1.2098.1.4	Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan	Kegiatan											
2099-Pembinaan Administrasi Kepegawaian								-	-	37	39	41	Subbag Tata Usaha
SK.1.2099.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)												
IKSK.1.2099.1.1	Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja	%			85	90	95						
IKSK.1.2099.1.2	Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindaklanjuti	%											
IKSK.1.2099.1.3	Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan	%											
IKSK.1.2099.1.4	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)	%			90	95	100						
IKSK.1.2099.1.5	Persentase ASN yang memenuhi syarat <i>leveling</i> kompetensi jabatannya	%											
IKSK.1.2099.1.6	Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu	%											
IKSK.1.2099.1.7	Persentase data ASN yang diupdate	%			90	95	100						
IKSK.1.2099.1.8	Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses	%											
2100-Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN								2,996	2,996	3,052	3,107	3,159	Subbag Tata Usaha
SK.1.2100.1	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan												
IKSK.1.2100.1.1	Jumlah Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	Dokumen	2	2	2	2	2						
IKSK.1.2100.1.2	Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)	%											
IKSK.1.2100.1.3	Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal	%	95	95	96	97	98						
IKSK.1.2100.1.4	Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama	%											
IKSK.1.2100.1.5	Persentase pencapaian dan penetapan target PNPB dan BLU	%											
SK.1.2100.2	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel												
IKSK.1.2100.2.1	Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya	%	90	92	95	97	100						
IKSK.1.2100.2.2	Persentase tanah yang bersertifikat	%											
IKSK.1.2100.2.3	Persentase nilai Opname Physic (OP) BMN	%											
2101-Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana								-	-	-	-	-	Subbag Tata Usaha

Lampiran I

Matriks Kinerja dan Pendanaan 5 Program

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK.1.2101.1	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi												
IKSK.1.2101.1.1	Persentase satuan kerja yang telah ditindaklanjuti dengan perubahan organisasi	%											
IKSK.1.2101.1.2	Jumlah dokumen perencanaan organisasi baru, pusat dan daerah yang diusulkan	Dokumen											
IKSK.1.2101.1.3	Persentase jabatan satuan kerja yang telah dievaluasi dan ditindaklanjuti dengan regulasi baru	%											
IKSK.1.2101.1.4	Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis	%											
IKSK.1.2101.1.5	Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi	%											
IKSK.1.2101.1.7	Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	%											
SK.1.2101.2	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi												
IKSK.1.2101.2.1	Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi	%											
IKSK.1.2101.2.2	Jumlah satuan kerja yang memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	Satker											
IKSK.1.2101.2.3	Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas	Satker											
IKSK.1.2101.2.4	Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja	Orang											
2102-Pembinaan Administrasi Perencanaan								-	10	20	25	30	Subbag Tata Usaha
SK.1.2102.1	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran												
IKSK.1.2102.1.1	Persentase <i>output</i> perencanaan yang berbasis data	%		75	85	95	100						
IKSK.1.2102.1.3	Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti	%											
SK.1.2102.2	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran												
IKSK.1.2102.2.1	Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas	%		75	85	95	100						
IKSK.1.2102.2.2	Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti	%											
2103-Pembinaan Administrasi Umum								921	1,343	1,393	1,477	1,542	Subbag Tata Usaha
SK.1.2103.1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor												
IKSK.1.2103.1.1	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	%											
SK.1.2103.2	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa												
IKSK.1.2103.2.1	Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu	%		85	90	95	100						
IKSK.1.2103.2.2	Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik	%											
IKSK.1.2103.2.3	Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen	%		35	50	75	90						

Lampiran I

Matriks Kinerja dan Pendanaan 5 Program

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.1.2103.2.4	Persentase menurunnya lelang gagal	%											
IKSK.1.2103.2.5	Persentase menurunnya sanggah dan sanggah banding	%											
2106-Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan								-	-	15	20	25	Subbag Tata Usaha
SK.1.2106.1	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi												
IKSK.1.2106.1.1	Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi	Kegiatan			50	75	100						
IKSK.1.2106.1.2	Persentase pemberitaan negatif tentang Kemenag yang di <i>counter</i>	%											
IKSK.1.2106.1.3	Persentase opini positif berita Kemenag	%											
SK.1.2106.2	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi												
IKSK.1.2106.2.2	Jumlah sistem informasi yang terintegrasi dalam <i>MoS (Mora one Search)</i>	Unit											
IKSK.1.2106.2.3	Jumlah satuan kerja yang terhubung dalam satu jaringan dan internet	Satker											
IKSK.1.2106.2.4	Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan <i>reliable</i>	%			80	90	100						
2125-Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam								9,000	10,000	11,000	12,000	13,000	Seksi Bimas Islam
SK.8.2125.1	Meningkatnya penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal												
IKSK.8.2125.1.1	Persentase temuan administrasi dan keuangan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang diselesaikan	%											
SK.8.2125.2	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi												
IKSK.8.2125.2.1	Persentase kesesuaian SOP layanan dengan peta proses bisnis	%											
IKSK.8.2125.2.2	Persentase produk hukum pengawasan yang diharmonisasikan	%											
SK.8.2125.3	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja												
IKSK.8.2125.3.1	Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	%	50	75	80	90	100						
IKSK.8.2125.3.2	Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian <i>output</i> belanja	%	90	93	95	97	99						
IKSK.8.2125.3.3	Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya	%											
SK.8.2125.4	Meningkatnya kematangan pengendalian intern												
IKSK.8.2125.4.1	Persentase dokumen manajemen risiko yang komprehensif, valid, dan reliabel	%											
IKSK.8.2125.4.2	Persentase data bidang agama yang komprehensif, valid dan reliabel	%											
SK.8.2125.5	Meningkatnya ASN yang profesional												
IKSK.8.2125.5.1	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)	%	95	96	97	98	99						
2135-Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam								31,897	32,534	33,491	34,129	34,448	Seksi Pendidikan Islam

Matriks Kinerja dan Pendanaan 5 Program

[illegible]

Lampiran I

Matriks Kinerja dan Pendanaan 5 Program

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK.1.2127.4	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik												
IKSK.1.2127.4.1	Persentase guru Pendidikan Agama Islam yang mengikuti PPG	%	77	80	87	88	93						
IKSK.1.2127.4.2	Persentase guru Pendidikan Agama Islam berkualifikasi minimal S1	%	77	80	87	88	93						
SK.1.2127.5	Meningkatnya pemenuhan dan distribusi tenaga pendidik berbasis kebutuhan												
IKSK.1.2127.5.1	Persentase guru Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Daerah Khusus (3T) yang mendapat tunjangan khusus	%											
SK.1.2127.6	Menguatnya pendidikan agama, nilai toleransi beragama dan budi pekerti dalam sistem pendidikan												
IKSK.1.2127.6.1	Persentase guru Pendidikan Agama Islam yang dibina dalam mengintegrasikan nilai toleransi beragama dan budi pekerti dalam pendidikan agama	%											
IKSK.1.2127.6.2	Persentase pengawas Pendidikan Agama Islam yang dibina dalam mensupervisi pelaksanaan pengintegrasian nilai toleransi beragama dan budi pekerti dalam pendidikan agama	%											
2138-Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen								23	-	-	-	-	Penyelenggaraan Bimas Kristen
SK.1.2138.1	Meningkatnya penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal												
IKSK.1.2138.1.1	Persentase temuan administrasi dan keuangan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100						
SK.1.2138.2	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi												
IKSK.1.2138.2.1	Persentase kesesuaian SOP layanan dengan peta proses bisnis	%	90	100	100	100	100						
IKSK.1.2138.2.2	Persentase produk hukum pengawasan yang diharmonisasikan/ diterbitkan	%	90	90	90	90	90						
SK.1.2138.3	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja												
IKSK.1.2138.3.1	Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	%	95	95	95	95	95						
IKSK.1.2138.3.2	Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian <i>output</i> belanja	%	99	99	100	100	100						
IKSK.1.2138.3.3	Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya	%	100	100	100	100	100						
SK.1.2138.4	Meningkatnya kematangan pengendalian intern												
IKSK.1.2138.4.1	Persentase dokumen manajemen risiko yang komprehensif, valid, dan reliabel	%	60	60	60	60	60						
IKSK.1.2138.4.2	Persentase data bidang agama dan pendidikan yang komprehensif, valid dan reliabel	%	90	90	90	90	90						
SK.1.2138.5	Meningkatnya ASN yang profesional												
IKSK.1.2138.5.1	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)	%	30	30	20	20	20						
IKSK.1.2138.5.2	Persentase ASN yang memenuhi syarat <i>leveling</i> kompetensi jabatannya	%	90	90	92	92	95						
5100-Penyelenggara Administrasi Perkantoran Bimas Kristen Bimas Kristen								6,537	6,531	7,421	7,422	7,422	Penyelenggaraan Bimas Kristen

Matriks Kinerja dan Pendanaan 5 Program

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK.1.5100.1	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan												
IKSK.1.5100.1.1	Jumlah dokumen penyusunan rencana program dan anggaran, keuangan, kepegawaian	Dokumen											
IKSK.1.5100.1.2	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang disediakan	Unit											
IKSK.1.5100.1.3	Jumlah layanan umum dan perlengkapan	Unit											
IKSK.1.5100.1.4	Jumlah produk hukum yang dihasilkan	Dokumen											
2141-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik								600	660	726	799	879	Penyelenggara Bimas Katolik
SK.1.2141.2	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi												
IKSK.1.2141.2.1	Persentase kesesuaian SOP layanan dengan peta proses bisnis	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00						
IKSK.1.2141.2.	Persentase produk hukum pengawasan yang diharmonisasikan/ diterbitkan	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00						
SK.1.2141.3	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja												
IKSK.1.2141.3.1	Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00						
IKSK.1.2141.3.2	Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian <i>output</i> belanja	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00						
IKSK.1.2141.3.3	Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00						
SK.1.2141.4	Meningkatnya kematangan pengendalian intern												
IKSK.1.2141.4.1	Persentase dokumen manajemen risiko yang komprehensif, valid, dan reliabel	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00						
IKSK.1.2141.4.2	Persentase data bidang agama dan pendidikan yang komprehensif, valid dan reliabel	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00						
SK.1.2141.5	Meningkatnya ASN yang profesional												
IKSK.1.2141.5.1	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)	%	100	100	100	100	100						
IKSK.1.2141.5.2	Persentase ASN yang memenuhi syarat <i>leveling</i> kompetensi jabatannya	%	100	100	100	100	100						
5102-Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik								436	479	527	580	638	Penyelenggara Bimas Katolik
SK.1.5102.1	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan												
IKSK.1.5102.1.1	Jumlah dokumen penyusunan rencana program dan anggaran, keuangan, kepegawaian	Dokumen	5	5	5	5	5						
IKSK.1.5102.1.2	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang disediakan	Unit	15	15	15	15	15						
IKSK.1.5102.1.3	Jumlah layanan umum dan perlengkapan	Unit	5	5	5	5	5						
IKSK.1.5102.1.4	Jumlah produk hukum yang dihasilkan	Dokumen	1	1	1	1	1						
2144-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu								307	284	298	313	329	Penyelenggara Bimas Hindu
SK.1.2144.1	Meningkatnya penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal												

Matriks Kinerja dan Pendanaan 5 Program

[illegible]

Lampiran I

Matriks Kinerja dan Pendanaan 5 Program

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>) /INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.1.2150.2.2	Persentase produk hukum pengawasan yang diharmonisasikan/ diterbitkan	%											
SK.1.2150.3	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja												
IKSK.1.2150.3.1	Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	%	70	75	80	85	90						
IKSK.1.2150.3.2	Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian <i>output</i> belanja	%	90	92	94	96	98						
IKSK.1.2150.3.3	Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya	%											
SK.1.2150.4	Meningkatnya kematangan pengendalian intern												
IKSK.1.2150.4.1	Persentase dokumen manajemen risiko yang komprehensif, valid, dan reliabel	%											
IKSK.1.2150.4.2	Persentase data agama yang komprehensif, valid dan reliabel	%	70	75	80	85	90						
SK.1.2150.5	Meningkatnya ASN yang profesional												
IKSK.1.2150.5.1	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)	%	90	92	94	96	98						
IKSK.1.2150.5.2	Persentase ASN yang memenuhi syarat <i>leveling</i> kompetensi jabatannya	%											
5620-Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama								30	60	260	290	320	Subbag Tata Usaha
SK.13.5620.1	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama												
IKSK.13.5620.1.1	Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti	%											
IKSK.13.5620.1.2	Jumlah aktor kerukunan yang dibina	Orang			400	450	500						
IKSK.13.5620.1.3	Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina	Lokasi											
SK.13.5620.2	Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa												
IKSK.13.5620.2.1	Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi	Lembaga											
IKSK.13.5620.2.2	Jumlah forum dialog antarumat beragama yang diselenggarakan	Kegiatan			4	5	6						
SK.13.5620.3	Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)												
IKSK.13.5620.3.1	Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP	%		100	100	100	100						
SK.13.5620.4	Menguatnya dialog lintas agama dan budaya												
IKSK.13.5620.4.1	Jumlah dialog lintas agama dan budaya	Kegiatan											
2104-Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah								675	675	1,200	1,200	2,000	Seksi Bimas Islam
SK.8.2104.1	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk												
IKSK.8.2104.1.1	Jumlah KUA yang direvitalisasi	Lokasi											
IKSK.8.2104.1.2	Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana	Lokasi	8	8	8	8	8						
IKSK.8.2104.1.3	Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah	Orang	250	250	300	300	350						

Matriks Kinerja dan Pendanaan 5 Program

[illegible]

Matriks Kinerja dan Pendanaan 5 Program

[illegible]

Lampiran I

Matriks Kinerja dan Pendanaan 5 Program

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.8.2124.4.6	Jumlah POB yang memenuhi standar	Lokasi											
IKSK.8.2124.4.7	Jumlah lembaga hisab rukyat yang ditingkatkan mutunya	Lembaga	1	1	1	1	1						
2137-Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen								72	164	901	901	901	Penyelenggaraan Bimas Kristen
SK.2.2137.1	Meningkatnya kualitas penyuluhan agama Kristen												
IKSK.2.2137.1.1	Nilai kinerja penyuluh agama	Nilai	75	80	85	90	95						
IKSK.2.2137.1.2	Persentase penyuluh agama yang dibina	%	100	100	100	100	100						
IKSK.2.2137.1.3	Jumlah penyar agama yang dibina kompetensi	Orang	12	21	25	30	35						
IKSK.2.2137.1.4	Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan	Kelompok	48	42	50	60	70						
SK.2.2137.2	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama Kristen												
IKSK.2.2137.2.1	Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama Kristen	%	100	100	100	100	100						
IKSK.2.2137.2.2	Jumlah forum dialog intra umat beragama Kristen yang diselenggarakan	Lokasi	4	8	8	8	8						
SK.2.2137.3	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama												
IKSK.2.2137.3.1	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat	%	100	100	100	100	100						
SK.2.2137.4	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran												
IKSK.2.2137.4.1	Persentase rumah ibadah yang ramah	%	75	80	85	90	95						
IKSK.2.2137.4.2	Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina	%	100	100	100	100	100						
SK.2.2137.5	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik												
IKSK.2.2137.5.1	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	Lokasi	2	2	3	4	5						
SK.2.2137.6	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama												
IKSK.2.2137.6.1	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (Pesparawi, dll)	Kegiatan	0	1	2	2	2						
SK.2.2137.7	Meningkatnya kualitas literasi khazanah budaya bernafas agama												
IKSK.2.2137.7.1	Jumlah Direktori Pustaka Agama yang diinventarisasi, kodifikasi, dan didigitalisasi	Dokumen	0	0	0	0	0						
IKSK.2.2137.7.2	Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina	Orang	0	5	5	5	5						
SK.2.2137.8	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat												
IKSK.2.2137.8.1	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)	Unit	0	1	2	3	4						
SK.2.2137.9	Meningkatnya pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi												
IKSK.2.2137.9.1	Jumlah <i>event</i> keagamaan dan budaya yang menumbuhkembangkan sikap toleran (hari besar keagamaan)	Kegiatan	2	4	4	4	4						

Lampiran I

Matriks Kinerja dan Pendanaan 5 Program

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK.2.2137.10	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan												
IKSK.2.2137.10.1	Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan	Unit	13	2	15	20	25						
IKSK.2.2137.10.2	Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan	Eksemplar	0	0	100	150	200						
IKSK.2.2137.10.3	Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi	%	100	100	100	100	100						
SK.2.2137.11	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga												
IKSK.2.2137.11.1	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga kristiani	Pasangan	12	50	50	60	75						
SK.2.2137.12	Meningkatnya pemberdayaan lembaga dana sumbangan keagamaan kristen												
IKSK.2.2137.12.1	Jumlah lembaga sumbangan keagamaan kristen yang berpartisipasi dalam pembinaan keagamaan	Lembaga	0	0	1	2	3						
2140-Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik								450	495	544	598	658	Penyelenggara Bimas Katolik
SK.2.2140.1	Meningkatnya kualitas penyuluhan agama Katolik												
IKSK.2.2140.1.1	Nilai kinerja penyuluh agama	Nilai	100	100	100	100	100						
IKSK.2.2140.1.2	Persentase penyuluh agama yang dibina	%	100	100	100	100	100						
IKSK.2.2140.1.3	Jumlah penyiur agama yang dibina kompetensi	Orang	10	10	10	10	10						
IKSK.2.2140.1.4	Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan	Kelompok	15	15	15	15	15						
SK.2.2140.2	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama Katolik												
IKSK.2.2140.2.1	Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama Katolik	%	10	10	10	10	10						
IKSK.2.2140.2.2	Jumlah forum dialog intra umat beragama Katolik yang diselenggarakan	Kegiatan	2	3	3	3	3						
SK.2.2140.3	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama												
IKSK.2.2140.3.1	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat	%	100	100	100	100	100						
SK.2.2140.4	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran												
IKSK.2.2140.4.1	Persentase rumah ibadah yang ramah	%	100	100	100	100	100						
IKSK.2.2140.4.2	Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina	%	100	100	100	100	100						
SK.2.2140.5	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik												
IKSK.2.2140.5.1	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	Lokasi	2	2	2	2	2						
SK.2.2140.6	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama												
IKSK.2.2140.6.1	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (Pesparani, dll)	Kegiatan	1	1	1	1	1						
SK.2.2140.7	Meningkatnya kualitas literasi khazanah budaya bernafas agama												
IKK.10.2140.7.1	Jumlah Direktori Pustaka Agama yang diinventarisasi, kodefikasi, dan didigitalisasi	Dokumen	2	2	2	2	2						

Matriks Kinerja dan Pendanaan 5 Program

[illegible]

Lampiran I

Matriks Kinerja dan Pendanaan 5 Program

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) /INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK.11.2143.5	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik												
IKSK.11.2143.5.1	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	Lokasi											
SK.11.2143.6	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama												
IKSK.11.2143.6.1	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (Dharmagita, dll)	Kegiatan											
SK.11.2143.7	Meningkatnya kualitas literasi khazanah budaya bernafas agama												
IKSK.11.2143.7.1	Jumlah Direktori Pustaka Agama yang diinventarisasi, kodefikasi, dan didigitalisasi	Dokumen											
IKSK.11.2143.7.2	Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina	Orang											
SK.11.2143.8	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat												
IKSK.11.2143.8.1	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)	Unit											
SK.11.2143.9	Meningkatnya pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi												
IKSK.11.2143.9.1	Jumlah event keagamaan dan budaya yang menumbuhkembangkan sikap toleran (hari besar keagamaan, sekaten, dll)	Kegiatan											
SK.11.2143.10	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan												
IKSK.11.2143.10.1	Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan	Unit											
IKSK.11.2143.10.2	Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan	Eksemplar											
IKSK.11.2143.10.3	Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi	%											
SK.11.2143.11	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga												
IKSK.11.2143.11.	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga sukinah	Pasangan											
SK.11.2143.12	Meningkatnya pemberdayaan lembaga dharma dana												
IKSK.11.2143.12.1	Jumlah lembaga dharma dan yang berpartisipasi dalam pembinaan keagamaan	Lembaga											
2147-Pelayanan Haji Dalam Negeri								12	15	20	25	30	Penyelenggaraan Haji dan Umroh
SK.6.2147.1	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji												
IKSK.2.2147.1.1	Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan	%			75	85	95						
IKSK.2.2147.1.2	Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan	%	25	20	15	10	5						
SK.2.2147.2	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji di asrama haji												
IKSK.2.2147.2.1	Persentase asrama haji yang memenuhi standar pelayanan	%	75	80	85	90	95						
IKSK.2.2147.2.2	Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu	%	75	80	85	90	95						
2148-Pembinaan Haji								78	55	60	65	70	Penyelenggaraan Haji dan Umroh

Matriks Kinerja dan Pendanaan 5 Program

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK.2.2148.1	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji												
IKSK.2.2148.1.1	Persentase petugas haji yang profesional	%	75	80	85	90	95						
IKSK.2.2148.1.2	Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji	%	90	92	94	96	98						
IKSK.2.2148.1.3	Persentase kasus jemaah haji yang terselesaikan	%											
IKSK.2.2148.1.4	Jumlah advokasi haji yang terselenggara	Kegiatan											
IKSK.2.2148.1.5	Persentase pembimbing haji yang bersertifikat	%											
2149-Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu								-	-	-	-	-	Penyelenggaraan Haji dan Umroh
SK.2.2149.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan dana operasional haji secara profesional, transparan, dan akuntabel												
IKSK.2.2149.1.1	Persentase realisasi pelaksanaan dana operasional haji	%											
SK.2.2149.2	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu												
IKSK.2.2149.2.1	Persentase keberlanjutan layanan (<i>Continuity service</i>)	%											
IKSK.2.2149.2.2	Tingkat kepuasan pengakses layanan <i>website</i> haji	Nilai											
442-Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Madrasah								-	-	-	-	-	Seksi Pendidikan Islam
SK.3.4422.1	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama												
IKSK.3.4422.1.1	Persentase siswa madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	%											
IKSK.3.4422.1.2	Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan pada madrasah yang bermuatan moderasi beragama	Kegiatan											
SK.3.4422.2	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pada pembelajaran inovatif												
IKSK.3.4422.2.1	Persentase madrasah yang menerapkan kurikulum yang berlaku	%	60	62	70	73	80						
IKSK.3.4422.2.2	Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum	%	45	60	65	90	95						
IKSK.3.4422.2.3	Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan	Lembaga	45	60	65	90	95						
IKSK.3.4422.2.4	Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan	Lembaga	45	60	65	90	95						
SK.3.4422.3	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan												
IKSK.3.4422.3.1	Persentase siswa yang mengikuti asesmen kompetensi	%	100	100	100	100	100						
SK.3.4422.4	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran												
IKSK.3.4422.4.1	Persentase madrasah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran	%	3	5	10	15	30						
IKSK.3.4422.4.2	Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran	%	5	9	10	15	30						
SK.3.4422.5	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi												

Matriks Kinerja dan Pendanaan 5 Program

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.3.4422.5.1	Jumlah Madrasah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi	Lembaga											
SK.3.4422.6	Meningkatnya budaya mutu pendidikan												
IKSK.3.4422.6.1	Persentase madrasah yang menerapkan budaya mutu	%											
IKSK.3.4422.6.2	Persentase siswa madrasah yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	%											
SK.3.4422.7	Menguatnya pembiayaan dan efektivitas pemanfaatan sumber dana dan anggaran pendidikan												
IKSK.3.4422.7.1	Persentase Madrasah yang mendapatkan Pelatihan Sistem e-RKAM	%											
SK.3.4422.8	Meningkatnya budaya belajar dan terwujudnya lingkungan madrasah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan												
IKSK.3.4422.8.1	Persentase MTs/MA yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	%	20	22	30	33	50						
IKSK.3.4422.8.2	Persentase Madrasah Ramah Anak	%	80	83	85	87	89						
SK.3.4422.9	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan keperamukaan												
IKSK.3.4422.9.1	Jumlah organisasi siswa yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan	Kegiatan											
IKSK.3.4422.9.2	Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina	Unit											
SK.3.4422.10	Menguatnya reformasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi												
IKSK.3.4422.10.1	Persentase MA Kejuruan dan MA Program Keterampilan yang meningkatkan <i>life skill</i> melalui program magang	%											
2133-Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah								24,360	24,847	25,334	25,821	26,308	Seksi Pendidikan Islam
SK.3.2133.1	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama												
IKSK.3.2133.1.1	Persentase guru madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	%											
IKSK.3.2133.1.2	Persentase pengawas madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	%											
SK.3.2133.2	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan												
IKSK.3.2133.2.1	Persentase Guru pada Madrasah yang lulus sertifikasi	%	80	82	84	86	88						
IKSK.3.2133.2.2	Persentase tenaga kependidikan Madarrasah yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	81	83	85	87	89						
IKSK.3.2133.2.3	Persentase Kepala Madrasah yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	81	83	85	87	89						
IKSK.3.2133.2.4	Persentase Guru Madrasah yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	79	81	83	87	89						
SK.3.2133.3	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan												
IKSK.3.2133.3.1	Persentase guru Madrasah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	%											
IKSK.3.2133.3.2	Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada Madrasah	Orang	15	19	25	27	28						
SK.3.2133.4	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik												

Matriks Kinerja dan Pendanaan 5 Program

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.3.2133.4.1	Persentase Guru Madrasah yang mengikuti PPG	%	80	82	84	86	88						
IKSK.3.2133.4.2	Persentase Calon Pengawas yang menerima beasiswa S2	%											
SK.3.2133.5	Meningkatnya pemenuhan dan distribusi tenaga pendidik berbasis kebutuhan												
IKSK.3.2133.5.1	Persentase Guru pada Madrasah Daerah Khusus (3T) yang mendapat Tunjangan Khusus	%											
IKSK.3.2133.5.2	Persentase Tenaga Kependidikan Madrasah Daerah Khusus (3T) yang mendapat Tunjangan Khusus	%											
SK.3.2133.6	Meningkatnya kualitas pendidik vokasi												
IKSK.3.2133.6.1	Jumlah Guru MA Kejuruan/MA Program Keterampilan yang mengikuti Peningkatan Kompetensi	Orang											
4433-Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam								-	-	-	-	-	Seksi Pendidikan Islam
SK.3.4433.1	Menguatnya peran Pendidikan Diniyah dan Pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama												
IKSK.3.4433.1.1	Persentase pesantren yang berwawasan moderat	%											
IKSK.3.4433.1.2	Persentase peningkatan peserta Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur'an	%											
SK.3.4433.2	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum yang mengintegrasikan kemampuan berpikir												
IKSK.3.4433.2.1	Persentase pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan kurikulum yang berlaku	%											
SK.3.4433.3	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan metode pembelajaran inovatif												
IKSK.3.4433.3.1	Persentase pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum	%											
SK.3.4433.4	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan												
IKSK.3.4433.4.1	Persentase ustadz pada pendidikan diniyah/ muadalah yang lulus sertifikasi	%											
IKSK.3.4433.4.2	Persentase tenaga kependidikan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi	%											
IKSK.3.4433.4.3	Persentase Kepala pendidikan diniyah/ muadalah yang mempe	%											
IKSK.3.4433.4.4	Persentase ustadz pendidikan diniyah/ muadalah yang mendapatkan penguatan melalui KKG/MGMP Pola PKB dan AKG	%											
SK.3.4433.5	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan												
IKSK.3.4433.5.1	Persentase ustadz pendidikan diniyah/ muadalah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	%											
SK.3.4433.6	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran												
IKSK.3.4433.6.1	Persentase pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran	%											
SK.3.4433.7	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi melalui peningkatan kualifikasi pendidik												

Matriks Kinerja dan Pendanaan 5 Program

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.3.4433.7.1	Persentase Ustadz pendidikan diniyah/ muadalah yang mengikuti PPG	%											
IKSK.3.4433.7.2	Persentase Ustadz pendidikan diniyah/ muadalah berkualifikasi minimal S1	%	60	65	66	70	75						
SK.3.4433.8	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi												
IKSK.3.4433.8.1	Jumlah Pendidikan Diniyah/Muadalah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi	Lembaga											
SK.3.4433.9	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi												
IKSK.3.4433.9.1	Persentase lembaga pendidikan diniyah/ muadalah yang menerapkan budaya mutu	Lembaga											
IKSK.3.4433.9.1	Persentase santri pendidikan diniyah/ muadalah yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	Lembaga											
SK.3.4433.10	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi												
IKSK.3.4433.10.1	Persentase pendidikan diniyah/muadalah yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	Lembaga											
IKSK.3.4433.10.1	Persentase kepala pendidikan diniyah/ muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman	Lembaga											
SK.3.4433.11	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan keperamukaan												
IKSK.3.4433.11.1	Jumlah organisasi siswa pendidikan diniyah/ muadalah yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan	Kegiatan	-	-	-	-	-						
IKSK.3.4433.11.1	Jumlah gugus pramuka pada pendidikan diniyah/ muadalah yang dibina	Unit	-	-	-	-	-						
SK.3.4433.12	Meningkatnya kualitas pendidik vokasi												
IKSK.3.4433.12.1	Jumlah Guru/Instruktur pada Program Ekonomi Kerakyatan di Pesantren yang mengikuti Peningkatan Kompetensi	Orang											
2127-Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam								8,948	9,216	9,932	10,021	10,469	Seksi Pendidikan Islam
SK.3.2127.1	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran/mata kuliah agama												
IKSK.3.2127.1.1	Persentase siswa muslim di sekolah yang memperoleh Pendidikan Agama Islam bermuatan moderasi beragama	%	60	63	71	72	77						
IKSK.3.2127.1.2	Persentase guru Pendidikan Agama Islam di sekolah yang dibina dalam moderasi beragama	%	67	70	77	78	83						
IKSK.3.2127.1.3	Persentase pengawas Pendidikan Agama Islam di sekolah yang dibina dalam moderasi beragama	%	73	76	83	84	89						
IKSK.3.2127.1.4	Persentase mahasiswa muslim di PTU , memperoleh Pendidikan Agama Islam yang bermuatan moderasi beragama	%											
IKSK.3.2127.1.5	Persentase dosen Pendidikan Agama Islam di PTU yang dibina dalam moderasi beragama	%											
SK.3.2127.2	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan												

Matriks Kinerja dan Pendanaan 5 Program

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.3.2127.2.1	Persentase guru Pendidikan Agama Islam yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	81	84	91	92	97						
IKSK.3.2127.2.2	Persentase dosen Pendidikan Agama Islam pada PTU yang memperoleh peningkatan kompetensi	%											
SK.3.2127.3	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan												
IKSK.3.2127.3.1	Persentase guru Pendidikan Agama Islam pada Sekolah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	%											
SK.3.2127.4	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik												
IKSK.3.2127.4.1	Persentase guru Pendidikan Agama Islam yang mengikuti PPG	%	77	80	87	88	93						
IKSK.3.2127.4.2	Persentase guru Pendidikan Agama Islam berkualifikasi minimal S1	%	77	80	87	88	93						
SK.3.2127.5	Meningkatnya pemenuhan dan distribusi tenaga pendidik berbasis kebutuhan												
IKSK.3.2127.5.1	Persentase guru Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Daerah Khusus (3T) yang mendapat tunjangan khusus	%											
SK.3.2127.6	Menguatnya pendidikan agama, nilai toleransi beragama dan budi pekerti dalam sistem pendidikan												
IKSK.3.2127.6.1	Persentase guru Pendidikan Agama Islam yang dibina dalam mengintegrasikan nilai toleransi beragama dan budi pekerti dalam pendidikan agama	%											
IKSK.3.2127.6.2	Persentase pengawas Pendidikan Agama Islam yang dibina dalam mensupervisi pelaksanaan pengintegrasian nilai toleransi beragama dan budi pekerti dalam pendidikan agama	%											
4434-Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Kristen								126	162	340	340	340	Penyelenggaraan Bimas Kristen
SK.3.4434.1	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama												
IKSK.3.4434.1.1	Persentase siswa di SDTK/SMPTK/SMTK/SMAK yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	%											
IKSK.3.4434.1.2	Persentase guru SDTK/ SMPTK/SMTK/SMAK yang dibina dalam moderasi beragama	%											
IKSK.3.4434.1.3	Persentase Pengawas SDTK/ SMPTK/SMTK/SMAK yang dibina dalam moderasi beragama	Kegiatan											
IKSK.3.4434.1.4	Jumlah kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan pada SDTK/ SMPTK/SMTK/SMAK yang bermuatan moderasi beragama	Kegiatan											
IKSK.3.4434.1.5	Persentase siswa beragama Kristen di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama Kristen bermuatan moderasi beragama	%	91.67	90	90	90	90						
IKSK.3.4434.1.6	Persentase guru pendidikan agama yang dibina dalam moderasi beragama	%	91.67	93.34	93.34	93.34	93.34						
IKSK.3.4434.1.7	Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah yang dibina dalam moderasi beragama	%	80	100	100	100	100						
SK.3.4434.2	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum yang mengintegrasikan kemampuan berpikir												

Matriks Kinerja dan Pendanaan 5 Program

[illegible]

Matriks Kinerja dan Pendanaan 5 Program

[illegible]

Matriks Kinerja dan Pendanaan 5 Program

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.3.4435.7.2	Persentase Guru Pendidikan Agama Katolik yang mengikuti PPG	%											
IKSK.3.4435.7.2	Persentase Calon Pengawas dan Kepala SMAK yang menerima beasiswa S2	%											
SK.3.4435.8	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi berdasarkan hasil pemetaan												
IKSK.3.4435.8.1	Jumlah SMAK yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi	Lembaga											
SK.3.4435.9	Meningkatnya budaya mutu pendidikan												
IKSK.3.4435.9.1	Persentase kepala SMAK yang menerapkan budaya mutu	Lembaga											
IKSK.3.4435.9.2	Persentase siswa SMAK yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	%											
SK.3.4435.10	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan												
IKSK.3.4435.10.1	Persentase SMAK yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	%											
IKSK.3.4435.10.2	Persentase SMAK Ramah Anak	%											
SK.3.4435.11	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan												
IKSK.3.4435.11.1	Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada SMAK yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan	Kegiatan											
IKSK.3.4435.11.2	Jumlah gugus pramuka pada SMAK yang dibina	Unit											
4436-Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Hindu								-	-	-	-	-	Penyelenggaraan Bimas Hindu
SK.3.4435.1	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama												
IKSK.3.4435.1.1	Persentase siswa Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	%											
IKSK.3.4434.1.2	Persentase guru Adhi Widya Pasraman/ Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang dibina dalam moderasi beragama	%											
IKSK.3.4435.1.3	Persentase pengawas Adhi Widya Pasraman/ Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang dibina dalam moderasi beragama	%											
IKSK.3.4435.1.4	Persentase guru pendidikan agama yang dibina dalam moderasi beragama	%											
IKSK.3.4435.1.5	Persentase pengawas pendidikan agama yang dibina dalam moderasi beragama	%											
IKSK.3.4435.1.6	Jumlah kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan pada Adhi Widya Pasraman/ Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang bermuatan moderasi beragama	Kegiatan											
IKSK.3.4435.1.7	Persentase siswa beragama Hindu di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	%											
SK.3.4435.2	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum yang mengintegrasikan kemampuan berpikir												

Matriks Kinerja dan Pendanaan 5 Program

[illegible]

Matriks Kinerja dan Pendanaan 5 Program

[illegible]

Matriks Kinerja dan Pendanaan 5 Program

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
2128-Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Keagamaan Islam								195	200	201	205	210	Seksi Pendidikan Islam
SK.4.2128.1	Menguatnya peran Pendidikan Diniyah dan Pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama												
IKSK.4.2128.1.1	Persentase peningkatan peserta Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur'an	%											
SK.4.2128.2	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan												
IKSK.4.2128.2.1	Persentase Ula yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	20	25	26	30	35						
IKSK.4.2128.2.2	Persentase Wustha yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	23	28	29	33	38						
IKSK.4.2128.2.3	Persentase Ulya yang memenuhi SPM sarana prasarana	%											
IKSK.4.2128.2.4	Persentase Pendidikan Keagamaan di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya	%											
SK.4.2128.3	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat												
IKSK.4.2128.3.1	Jumlah siswa penerima BOS pada pendidikan diniyah/muadalah	Orang	195	200	201	205	210						
IKSK.4.2128.3.2	Persentase Pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional	%	70	75	76	80	85						
IKSK.4.2128.3.3	Persentase siswa penerima PIP pada pendidikan diniyah/muadalah	%											
SK.4.2128.4	Meningkatnya Kualitas Penanganan Anak Tidak Sekolah												
IKSK.4.2128.4.1	Persentase ATS yang mengikuti Program Pendidikan Kesetaraan (PPK) di Pesantren	%	7	12	13	17	22						
2136-Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen								-	-	240	240	240	Penyelenggaraan Bimas Kristen
SK.4.2136.1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan												
IKSK.4.2136.1.1	Persentase SDTK yang memenuhi SPM sarana prasarana	%											
IKSK.4.2136.1.2	Persentase SMPTK yang memenuhi SPM sarana prasarana	%											
IKSK.4.2136.1.3	Persentase SMTK/SMAK yang memenuhi SPM sarana prasarana	%											
SK.4.2136.2	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat												
IKSK.4.2136.2.1	Jumlah siswa SDTK penerima BOS	Orang											
IKSK.4.2136.2.2	Jumlah siswa SMPTK penerima BOS	Orang											
IKSK.4.2136.2.3	Jumlah siswa SMTK/ SMAK penerima BOS	Orang											
IKSK.4.2136.2.4	Persentase siswa SDTK penerima PIP	%											
IKSK.4.2136.2.5	Persentase siswa SMPTK penerima PIP	%											
IKSK.4.2136.2.6	Persentase siswa SMTK/ SMAK penerima PIP	%											
2139-Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik								215	237	260	286	315	Penyelenggara Bimas Katolik
SK.4.2139.1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan												

Matriks Kinerja dan Pendanaan 5 Program

[illegible]



Lampiran 2

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN 12 PROGRAM

Matriks Kinerja dan Pendanaan 12 Program

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) /INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
2098-Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN								-	-	-	-	-	Subbag Tata Usaha
SK.1.2098.1	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum												
IKSK.1.2098.1.1	Persentase produk hukum yang diharmonisasikan	%											
IKSK.1.2098.1.2	Persentase produk hukum yang diterbitkan	%											
IKSK.1.2098.1.3	Persentase kasus hukum yang terselesaikan	%											
IKSK.1.2098.1.4	Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan	Kegiatan											
2099-Pembinaan Administrasi Kepegawaian								-	-	37	39	41	Subbag Tata Usaha
SK.1.2099.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)												
IKSK.1.2099.1.1	Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja	%			85	90	95						
IKSK.1.2099.1.2	Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindaklanjuti	%											
IKSK.1.2099.1.3	Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan	%											
IKSK.1.2099.1.4	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)	%			90	95	100						
IKSK.1.2099.1.5	Persentase ASN yang memenuhi syarat <i>leveling</i> kompetensi jabatannya	%											
IKSK.1.2099.1.6	Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu	%											
IKSK.1.2099.1.7	Persentase data ASN yang diupdate	%			90	95	100						
IKSK.1.2099.1.8	Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses	%											
2100-Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN								2,996	2,996	3,052	3,107	3,159	Subbag Tata Usaha
SK.1.2100.1	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan												
IKSK.1.2100.1.1	Jumlah Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	Dokumen	2	2	2	2	2						
IKSK.1.2100.1.2	Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)	%											
IKSK.1.2100.1.3	Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal	%	95	95	96	97	98						
IKSK.1.2100.1.4	Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama	%											
IKSK.1.2100.1.5	Persentase pencapaian dan penetapan target PNPB dan BLU	%											
SK.1.2100.2	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel												
IKSK.1.2100.2.1	Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya	%	90	92	95	97	100						
IKSK.1.2100.2.2	Persentase tanah yang bersertifikat	%											
IKSK.1.2100.2.3	Persentase nilai Opname Physic (OP) BMN	%											
2101-Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana								-	-	-	-	-	Subbag Tata Usaha
SK.1.2101.1	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi												

Matriks Kinerja dan Pendanaan 12 Program

[illegible]

Matriks Kinerja dan Pendanaan 12 Program

[illegible]

Matriks Kinerja dan Pendanaan 12 Program

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK.8.2104.2	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga												
IKSK.8.2104.2.1	Jumlah keluarga yang menerima bimbingan dan layanan pusaka sakinah	Pasangan		100	250	300	350						
2122-Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf								5	5	55	60	65	Seksi Bimas Islam
SK.8.2122.1	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat												
IKSK.8.2122.1.1	Persentase lembaga zakat yang terakreditasi sesuai syariah	%											
IKSK.8.2122.1.2	Persentase amil yang memiliki sertifikat kompetensi	%											
IKSK.8.2122.1.3	Persentase lembaga zakat yang dibina	%											
SK.8.2122.2	Meningkatnya pengelolaan aset wakaf												
IKSK.8.2122.2.1	Persentase lembaga wakaf yang dibina	%			10	15	25						
IKSK.8.2122.2.2	Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan	%											
IKSK.8.2122.2.3	Persentase tanah wakaf yang bersertifikat	%	10	15	25	50	75						
SK.8.2122.3	Meningkatnya kualitas kelembagaan ekonomi umat												
IKSK.8.2122.3.1	Persentase partisipasi umat Islam dalam pangsa pasar keuangan syariah	%											
IKSK.8.2122.3.2	Persentase lembaga ekonomi umat berbasis zakat dan wakaf yang mendapat pembinaan	%											
2123-Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan agama Islam								400	460	685	750	860	Seksi Bimas Islam
SK.8.2123.1	Meningkatnya kualitas penyuluhan agama												
IKSK.8.2123.1.1	Nilai kinerja penyuluh agama	Nilai											
IKSK.8.2123.1.2	Persentase penyuluh agama yang dibina	%	80	85	90	95	100						
IKSK.8.2123.1.3	Jumlah penyiur agama yang dibina kompetensi	Orang											
IKSK.8.2123.1.4	Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan	Kelompok											
SK.8.2123.2	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama												
IKSK.8.2123.2.1	Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama	%	15	25	35	45	55						
IKSK.8.2123.2.2	Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan	Lokasi											
SK.8.2123.3	Persentase Penyuluh Agama yang berwawasan moderat												
IKSK.8.2123.3.1	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat	%											
SK.8.2123.4	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik												
IKSK.8.2123.4.1	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	Lokasi											
SK.8.2123.5	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat												

Matriks Kinerja dan Pendanaan 12 Program

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.8.2123.5.1	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)	Unit											
SK.8.2123.6	Meningkatnya pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi												
IKSK.8.2123.6.1	Jumlah event keagamaan dan budaya yang menumbuh kembangkan sikap toleran (hari besar keagamaan)	Kegiatan											
SK.8.2123.7	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama												
IKSK.8.2123.7.1	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (MTQ, dll)	Kegiatan			1	1	1						
SK.8.2123.8	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama												
IKSK.8.2123.8.1	Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi	%											
2124-Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah								3	3	13	20	25	Seksi Bimas Islam
SK.8.2124.1	Meningkatnya penanganan konflik intra umat beragama												
IKSK.8.2124.1.1	Persentase konflik intra umat beragama yang ditindaklanjuti	%											
SK.8.2124.2	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran												
IKSK.8.2124.2.1	Persentase rumah ibadah yang ramah	%	10	25	45	55	75						
IKSK.8.2124.2.2	Jumlah pengelola rumah ibadah yang dibina	Orang											
IKSK.8.2124.2.3	Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya	Orang											
IKSK.8.2124.2.4	Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan	Lokasi											
SK.8.2124.3	Meningkatnya kualitas literasi khazanah budaya bernafas agama												
IKSK.8.2124.3.1	Jumlah direktori pustaka agama yang diinventarisasi, kodefikasi, dan didigitalisasi	Dokumen											
IKSK.8.2124.3.2	Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina	Orang											
SK.8.2124.4	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan												
IKSK.8.2124.4.1	Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan	Unit											
IKSK.8.2124.4.2	Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan	Eksemplar			200	250	300						
IKSK.8.2124.4.3	Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan	Kegiatan											
IKSK.8.2124.4.4	Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat	Lokasi											
IKSK.8.2124.4.5	Jumlah SDM Ahli Falakiyah yang terbina	Orang											
IKSK.8.2124.4.6	Jumlah POB yang memenuhi standar	Lokasi											
IKSK.8.2124.4.7	Jumlah lembaga hisab rukyat yang ditingkatkan mutunya	Lembaga	1	1	1	1	1						
2125-Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam								9,000	10,000	11,000	12,000	13,000	Seksi Bimas Islam
SK.8.2125.1	Meningkatnya penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal												

Matriks Kinerja dan Pendanaan 12 Program

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.8.2125.1.1	Persentase temuan administrasi dan keuangan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang diselesaikan	%											
SK.8.2125.2	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi												
IKSK.8.2125.2.1	Persentase kesesuaian SOP layanan dengan peta proses bisnis	%											
IKSK.8.2125.2.2	Persentase produk hukum pengawasan yang diharmonisasikan	%											
SK.8.2125.3	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja												
IKSK.8.2125.3.1	Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	%	50	75	80	90	100						
IKSK.8.2125.3.2	Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian <i>output</i> belanja	%	90	93	95	97	99						
IKSK.8.2125.3.3	Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya	%											
SK.8.2125.4	Meningkatnya kematangan pengendalian intern												
IKSK.8.2125.4.1	Persentase dokumen manajemen risiko yang komprehensif, valid, dan reliabel	%											
IKSK.8.2125.4.2	Persentase data bidang agama yang komprehensif, valid dan reliabel	%											
SK.8.2125.5	Meningkatnya ASN yang profesional												
IKSK.8.2125.5.1	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)	%	95	96	97	98	99						
2127-Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam								8,948	9,216	9,932	10,021	10,469	Seksi Pendidikan Islam
SK.7.2127.1	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran/mata kuliah agama												
IKSK.7.2127.1.1	Persentase siswa muslim di sekolah yang memperoleh Pendidikan Agama Islam bermuatan moderasi beragama	%	60	63	71	72	77						
IKSK.7.2127.1.2	Persentase guru Pendidikan Agama Islam di sekolah yang dibina dalam moderasi beragama	%	67	70	77	78	83						
IKSK.7.2127.1.3	Persentase pengawas Pendidikan Agama Islam di sekolah yang dibina dalam moderasi beragama	%	73	76	83	84	89						
IKSK.7.2127.1.4	Persentase mahasiswa muslim di PTU, memperoleh Pendidikan Agama Islam yang bermuatan moderasi beragama	%											
IKSK.7.2127.1.5	Persentase dosen Pendidikan Agama Islam di PTU yang dibina dalam moderasi beragama	%											
SK.7.2127.2	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan												
IKSK.7.2127.2.1	Persentase guru Pendidikan Agama Islam yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	81	84	91	92	97						
IKSK.7.2127.2.2	Persentase dosen Pendidikan Agama Islam pada PTU yang memperoleh peningkatan kompetensi	%											
SK.7.2127.3	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan												
IKSK.7.2127.3.1	Persentase guru Pendidikan Agama Islam pada Sekolah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	%											
SK.7.2127.4	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik												

Matriks Kinerja dan Pendanaan 12 Program

[illegible]

Matriks Kinerja dan Pendanaan 12 Program

[illegible]

Lampiran II

Matriks Kinerja dan Pendanaan 12 Program

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK.7.2128.14	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan												
IKSK.7.2128.14.1	Persentase pendidikan diniyah/muadalah yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	%	30	35	36	40	45						
IKSK.7.2128.14.2	Persentase kepala pendidikan diniyah/ muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman	%	10	15	16	20	25						
SK.7.2128.15	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan keperamukaan												
IKSK.7.2128.15.1	Jumlah organisasi siswa pendidikan diniyah/ muadalah yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan	Kegiatan											
IKSK.7.2128.15.2	Jumlah gugus pramuka pada pendidikan diniyah/ muadalah yang dibina	Unit											
SK.7.2128.16	Meningkatnya kualitas pendidik vokasi												
IKSK.7.2128.16.1	Jumlah Guru/Instruktur pada Program Ekonomi Kerakyatan di Pesantren yang mengikuti Peningkatan Kompetensi	Orang											
SK.7.2128.17	Meningkatnya kualitas lulusan Ma'had Aly												
IKSK.7.2128.17.1	Persentase lulusan Ma'had Aly yang tepat waktu	%											
IKSK.7.2128.17.2	Rerata lama masa studi mahasiswa Ma'had Aly	Tahun											
2129-Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah								5,161	5,264	5,677	5,831	6,193	Seksi Pendidikan Islam
SK.7.2129.1	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama												
IKSK.7.2129.1.1	Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	%											
IKSK.7.2129.1.2	Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan pada madrasah yang bermuatan moderasi beragama	Kegiatan											
SK.7.2129.2	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum yang mengintegrasikan kemampuan berpikir												
IKSK.7.2129.2.1	Persentase madrasah yang menerapkan kurikulum yang berlaku	%	60	62	70	73	80						
SK.7.2129.3	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif												
IKSK.7.2129.3.1	Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum	%	45	60	65	90	95						
SK.7.2129.4	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan												
IKSK.7.2129.4.1	Persentase siswa yang mengikuti asesmen kompetensi	%	100	100	100	100	100						
SK.7.2129.5	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran												
IKSK.7.2129.5.1	Persentase madrasah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran	%	3	5	10	15	30						
IKSK.7.2129.5.2	Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran	%	5	9	10	15	30						
SK.7.2129.6	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan												
IKSK.7.2129.6.1	Persentase RA yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	69	70	71	72	73						

Matriks Kinerja dan Pendanaan 12 Program

[illegible]

Matriks Kinerja dan Pendanaan 12 Program

[illegible]

Matriks Kinerja dan Pendanaan 12 Program

[illegible]

Lampiran II

Matriks Kinerja dan Pendanaan 12 Program

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.9.2136.5.2	Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran	%											
SK.9.2136.6	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan												
IKSK.9.2136.6.1	Persentase SDTK yang memenuhi SPM sarana prasarana	%											
IKSK.9.2136.6.2	Persentase SMPTK yang memenuhi SPM sarana prasarana	%											
IKSK.9.2136.6.3	Persentase SMTK/SMAK yang memenuhi SPM sarana prasarana	%											
SK.9.2136.7	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat												
IKSK.9.2136.7.1	Jumlah siswa SDTK penerima BOS	Orang											
IKSK.9.2136.7.2	Jumlah siswa SMPTK penerima BOS	Orang											
IKSK.9.2136.7.3	Jumlah siswa SMTK/ SMAK penerima BOS	Orang											
IKSK.9.2136.7.4	Persentase siswa SDTK penerima PIP	%											
IKSK.9.2136.7.5	Persentase siswa SMPTK penerima PIP	%											
IKSK.9.2136.7.6	Persentase siswa SMTK/ SMAK penerima PIP	%											
SK.9.2136.8	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal												
IKSK.9.2136.8.1	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	%	92	92	92	92	92						
IKSK.9.2136.8.2	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	%											
SK.9.2136.9	Meningkatnya kualitas kompetensi guru dan tenaga kependidikan												
IKSK.9.2136.9.2	Persentase Guru Pendidikan Agama Kristen yang mengikuti PPG	%											
SK.9.2136.12	Meningkatnya jumlah pendidikan keagamaan yang melaksanakan program pendidikan karakter												
IKSK.9.2136.12.1	Persentase SMPTK/ SMTK/SMAK yang melaksanakan program pendidikan karakter	%											
SK.9.2136.13	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan												
IKSK.9.2136.13.1	Persentase SDTK/SMPTK/SMTK/SMAK yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	%											
IKSK.9.2136.13.2	Persentase SMPTK/ SMTK/SMAK Ramah Anak	%											
SK.9.2136.14	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan												
IKSK.9.2136.14.1	Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada SDTK/SMPTK/ SMTK/SMAK yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan	Kegiatan											
IKSK.9.2136.14.2	Jumlah gugus pramuka pada SDTK/SMPTK/ SMTK/SMAK yang dibina	Unit											
2137-Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen								72	164	901	901	901	Penyelenggaraan Bimas Kristen
SK.9.2137.1	Meningkatnya kualitas penyuluhan agama Kristen												
IKSK.9.2137.1.1	Nilai kinerja penyuluh agama	Nilai	75	80	85	90	95						

Matriks Kinerja dan Pendanaan 12 Program

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.9.2137.1.2	Persentase penyuluh agama yang dibina	%	100	100	100	100	100						
IKSK.9.2137.1.3	Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensi	Orang	12	21	25	30	35						
IKSK.9.2137.1.4	Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan	Kelompok	48	42	50	60	70						
SK.9.2137.2	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama Kristen												
IKSK.9.2137.2.1	Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama Kristen	%	100	100	100	100	100						
IKSK.9.2137.2.2	Jumlah forum dialog intra umat beragama Kristen yang diselenggarakan	Lokasi	4	8	8	8	8						
SK.9.2137.3	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama												
IKSK.9.2137.3.1	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat	%	100	100	100	100	100						
SK.9.2137.4	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran												
IKSK.9.2137.4.1	Persentase rumah ibadah yang ramah	%	75	80	85	90	95						
IKSK.9.2137.4.2	Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina	%	100	100	100	100	100						
SK.9.2137.5	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik												
IKSK.9.2137.5.1	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	Lokasi	2	2	3	4	5						
SK.9.2137.6	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama												
IKSK.9.2137.6.1	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (Pesparawi, dll)	Kegiatan		1	2	2	2						
SK.9.2137.7	Meningkatnya kualitas literasi khazanah budaya bernafas agama												
IKSK.9.2137.7.1	Jumlah Direktori Pustaka Agama yang diinventarisasi, kodifikasi, dan didigitalisasi	Dokumen											
IKSK.9.2137.7.2	Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina	Orang		5	5	5	5						
SK.9.2137.8	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat												
IKSK.9.2137.8.1	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)	Unit		1	2	3	4						
SK.9.2137.9	Meningkatnya pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi												
IKSK.9.2137.9.1	Jumlah <i>event</i> keagamaan dan budaya yang menumbuhkan sikap toleran (hari besar keagamaan)	Kegiatan	2	4	4	4	4						
SK.9.2137.10	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan												
IKSK.9.2137.10.1	Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan	Unit	13	2	15	20	25						
IKSK.9.2137.10.2	Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan	Eksemplar			100	150	200						
IKSK.9.2137.10.3	Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi	%	100	100	100	100	100						
SK.9.2137.11	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga												

Matriks Kinerja dan Pendanaan 12 Program

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>) / INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.9.2137.11.1	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga kristiani	Pasangan	12	50	50	60	75						
SK.9.2137.12	Meningkatnya pemberdayaan lembaga dana sumbangan keagamaan kristen												
IKSK.9.2137.12.1	Jumlah lembaga sumbangan keagamaan kristen yang berpartisipasi dalam pembinaan keagamaan	Lembaga			1	2	3						
2138-Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen								23	-	-	-	-	Penyelenggaraan Bimas Kristen
SK.9.2138.1	Meningkatnya penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal												
IKSK.9.2138.1.1	Persentase temuan administrasi dan keuangan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100						
SK.9.2138.2	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi												
IKSK.9.2138.2.1	Persentase kesesuaian SOP layanan dengan peta proses bisnis	%	90	100	100	100	100						
IKSK.9.2138.2.2	Persentase produk hukum pengawasan yang diharmonisasikan/ diterbitkan	%	90	90	90	90	90						
SK.9.2138.3	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja												
IKSK.9.2138.3.1	Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	%	95	95	95	95	95						
IKSK.9.2138.3.2	Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian <i>output</i> belanja	%	99	99	100	100	100						
IKSK.9.2138.3.3	Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya	%	100	100	100	100	100						
SK.9.2138.4	Meningkatnya kematangan pengendalian intern												
IKSK.9.2138.4.1	Persentase dokumen manajemen risiko yang komprehensif, valid, dan reliabel	%	60	60	60	60	60						
IKSK.9.2138.4.2	Persentase data bidang agama dan pendidikan yang komprehensif, valid dan reliabel	%	90	90	90	90	90						
SK.9.2138.5	Meningkatnya ASN yang profesional												
IKSK.9.2138.5.1	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)	%	30	30	20	20	20						
IKSK.9.2138.5.2	Persentase ASN yang memenuhi syarat <i>leveling</i> kompetensi jabatannya	%	90	90	92	92	95						
5100-Penyelenggara Administrasi Perkantoran Bimas Kristen Bimas Kristen								6,537	6,531	7,421	7,422	7,422	Penyelenggaraan Bimas Kristen
SK.9.5100.1	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan												
IKSK.9.5100.1.1	Jumlah dokumen penyusunan rencana program dan anggaran, keuangan, kepegawaian	Dokumen											
IKSK.9.5100.1.2	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang disediakan	Unit											
IKSK.9.5100.1.3	Jumlah layanan umum dan perlengkapan	Unit											
IKSK.9.5100.1.4	Jumlah produk hukum yang dihasilkan	Dokumen											
2139-Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik								215	237	260	286	315	Penyelenggara Bimas Katolik
SK.10.2139.1	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama												

Matriks Kinerja dan Pendanaan 12 Program

[illegible]

Matriks Kinerja dan Pendanaan 12 Program

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.10.2139.8.2	Persentase Guru Pendidikan Agama Katolik yang mengikuti PPG	%											
IKSK.10.2139.8.3	Persentase Calon Pengawas dan Kepala SMAK yang menerima beasiswa S2	%											
SK.10.2139.9	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi berdasarkan hasil pemetaan												
IKSK.10.2139.9.1	Jumlah SMAK yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi	Lembaga											
SK.10.2139.10	Meningkatnya budaya mutu pendidikan												
IKSK.10.2139.10.1	Persentase kepala SMAK yang menerapkan budaya mutu	%											
IKSK.10.2139.10.2	Persentase siswa SMAK yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	%											
SK.10.2139.11	Meningkatnya jumlah pendidikan keagamaan yang melaksanakan program pendidikan karakter												
IKSK.10.2139.11.1	Persentase SMAK yang melaksanakan program pendidikan karakter	%											
SK.10.2139.12	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan												
IKSK.10.2139.12.1	Persentase SMAK yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	%											
IKSK.10.2139.12.2	Persentase SMAK Ramah Anak	%											
SK.10.2139.13	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan												
IKSK.10.2139.13.1	Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada SMAK yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan	Kegiatan											
IKSK.10.2139.13.2	Jumlah gugus pramuka pada SMAK yang dibina	Unit											
2140-Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik								450	495	544	598	658	Penyelenggara Bimas Katolik
SK.10.2140.1	Meningkatnya kualitas penyuluhan agama Katolik												
IKSK.10.2140.1.1	Nilai kinerja penyuluh agama	Nilai	100	100	100	100	100						
IKSK.10.2140.1.2	Persentase penyuluh agama yang dibina	%	100	100	100	100	100						
IKSK.10.2140.1.3	Jumlah penziar agama yang dibina kompetensi	Orang	10	10	10	10	10						
IKSK.10.2140.1.4	Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan	Kelompok	15	15	15	15	15						
SK.10.2140.2	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama Katolik												
IKSK.10.2140.2.1	Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama Katolik	%	10	10	10	10	10						
IKSK.10.2140.2.2	Jumlah forum dialog intra umat beragama Katolik yang diselenggarakan	Kegiatan	2	3	3	3	3						
SK.10.2140.3	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama												
IKSK.10.2140.3.1	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat	%	100	100	100	100	100						
SK.10.2140.4	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran												

Lampiran II

Matriks Kinerja dan Pendanaan 12 Program

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) /INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.10.2140.4.1	Persentase rumah ibadah yang ramah	%	100	100	100	100	100						
IKSK.10.2140.4.2	Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina	%	100	100	100	100	100						
SK.10.2140.5	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik												
IKSK.10.2140.5.1	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	Lokasi	2	2	2	2	2						
SK.10.2140.6	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama												
IKSK.10.2140.6.1	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (Pesparani, dll)	Kegiatan	1	1	1	1	1						
SK.10.2140.7	Meningkatnya kualitas literasi khazanah budaya bernafas agama												
IKK.10.2140.7.1	Jumlah Direktori Pustaka Agama yang diinventarisasi, kodefikasi, dan didigitalisasi	Dokumen	2	2	2	2	2						
IKK.10.2140.7.2	Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina	Orang	2	2	2	2	2						
SK.10.2140.8	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat												
IKSK.10.2140.8.1	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)	Unit											
SK.10.2140.9	Meningkatnya pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi												
IKSK.10.2140.9.1	Jumlah event keagamaan dan budaya yang menumbuhkan sikap toleran (hari besar keagamaan)	Kegiatan	1	1	1	1	1						
SK.10.2140.10	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan												
IKSK.10.2140.10.1	Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan	Unit	10	10	10	10	10						
IKSK.10.2140.10.2	Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan	Eksemplar	20	20	30	30	50						
IKSK.10.2140.10.3	Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi	%	10	15	20	20	25						
SK.10.2140.11	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga												
IKSK.10.2140.11.1	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga bahagia	Pasangan	50	50	50	60	60						
SK.10.2140.12	Meningkatnya pemberdayaan lembaga dana sumbangan keagamaan katolik												
IKSK.10.2140.12.1	Jumlah lembaga sumbangan keagamaan Katolik yang berpartisipasi dalam pembinaan keagamaan	Lembaga	2	2	2	2	2						
2141-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik								600	660	726	799	879	Penyelenggara Bimas Katolik
SK.10.2141.2	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi												
IKSK.10.2141.2.1	Persentase kesesuaian SOP layanan dengan peta proses bisnis	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00						
IKSK.10.2141.2.	Persentase produk hukum pengawasan yang diharmonisasikan/ diterbitkan	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00						
SK.10.2141.3	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja												
IKSK.10.2141.3.1	Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00						

Matriks Kinerja dan Pendanaan 12 Program

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>) / INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.10.2141.3.2	Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian <i>output</i> belanja	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00						
IKSK.10.2141.3.3	Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00						
SK.10.2141.4	Meningkatnya kematangan pengendalian intern												
IKSK.10.2141.4.1	Persentase dokumen manajemen risiko yang komprehensif, valid, dan reliabel	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00						
IKSK.10.2141.4.2	Persentase data bidang agama dan pendidikan yang komprehensif, valid dan reliabel	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00						
SK.10.2141.5	Meningkatnya ASN yang profesional												
IKSK.10.2141.5.1	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)	%	100	100	100	100	100						
IKSK.10.2141.5.2	Persentase ASN yang memenuhi syarat <i>leveling</i> kompetensi jabatannya	%	100	100	100	100	100						
5102-Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik								436	479	527	580	638	Penyelenggara Bimas Katolik
SK.10.5102.1	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan												
IKSK.10.5102.1.1	Jumlah dokumen penyusunan rencana program dan anggaran, keuangan, kepegawaian	Dokumen	5	5	5	5	5						
IKSK.10.5102.1.2	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang disediakan	Unit	15	15	15	15	15						
IKSK.10.5102.1.3	Jumlah layanan umum dan perlengkapan	Unit	5	5	5	5	5						
IKSK.10.5102.1.4	Jumlah produk hukum yang dihasilkan	Dokumen	1	1	1	1	1						
2142-Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu								-	-	-	-	-	Penyelenggara Bimas Hindu
SK.11.2142.1	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama												
IKSK.11.2142.1.1	Persentase siswa Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	%											
IKSK.11.2142.1.2	Persentase guru Adhi Widya Pasraman/ Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang dibina dalam moderasi beragama	%											
IKSK.11.2142.1.3	Persentase pengawas Adhi Widya Pasraman/ Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang dibina dalam moderasi beragama	%											
IKSK.11.2142.1.4	Persentase guru pendidikan agama yang dibina dalam moderasi beragama	%											
IKSK.11.2142.1.5	Persentase pengawas pendidikan agama yang dibina dalam moderasi beragama	%											
IKSK.11.2142.1.6	Jumlah kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan pada Adhi Widya Pasraman/ Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang bermuatan moderasi beragama	Kegiatan											
IKSK.11.2142.1.7	Persentase siswa beragama Hindu di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	%											
SK.11.2142.2	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum yang mengintegrasikan kemampuan berpikir												

Matriks Kinerja dan Pendanaan 12 Program

[illegible]

Matriks Kinerja dan Pendanaan 12 Program

[illegible]

Matriks Kinerja dan Pendanaan 12 Program

[illegible]

Lampiran II

Matriks Kinerja dan Pendanaan 12 Program

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>) / INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK.11.2143.10	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan												
IKSK.11.2143.10.1	Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan	Unit											
IKSK.11.2143.10.2	Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan	Eksemplar											
IKSK.11.2143.10.3	Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi	%											
SK.11.2143.11	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga												
IKSK.11.2143.11.	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga sukinah	Pasangan											
SK.11.2143.12	Meningkatnya pemberdayaan lembaga darma dana												
IKSK.11.2143.12.1	Jumlah lembaga darma dan yang berpartisipasi dalam pembinaan keagamaan	Lembaga											
2144-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu								307	284	298	313	329	Penyelenggara Bimas Hindu
SK.11.2144.1	Meningkatnya penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal												
IKSK.11.2144.1.1	Persentase temuan administrasi dan keuangan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang diselesaikan	%	80	85	90	95	100						
SK.11.2144.2	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi												
IKSK.11.2144.2.1	Persentase kesesuaian SOP layanan dengan peta proses bisnis	%											
IKSK.11.2144.2.2	Persentase produk hukum yang diharmonisasikan/ diterbitkan	%											
SK.11.2144.3	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja												
IKSK.11.2144.3.1	Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	%											
IKSK.11.2144.3.3	Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian <i>output</i> belanja	%	77	90	90	100	100						
IKSK.11.2144.3.4	Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya	%											
SK.11.2144.4	Meningkatnya kematangan pengendalian intern												
IKSK.11.2144.4.1	Persentase dokumen manajemen risiko yang komprehensif, valid, dan reliabel	%											
IKSK.11.2144.4.2	Persentase data bidang agama dan pendidikan yang komprehensif, valid dan reliabel	%											
SK.11.2144.5	Meningkatnya ASN yang profesional												
IKSK.11.2144.5.1	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)	%											
IKSK.11.2144.5.2	Persentase ASN yang memenuhi syarat <i>leveling</i> kompetensi jabatannya	%											
5103-Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu								-	715	751	788	827	Penyelenggara Bimas Hindu
SK.11.5103.1	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan												
IKSK.11.5103.1.1	Jumlah dokumen penyusunan rencana program dan anggaran, keuangan, kepegawaian	Dokumen	2	2	2	2	2						

Matriks Kinerja dan Pendanaan 12 Program

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.11.5103.1.2	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang disediakan	Unit	2	2	2	2	2						
IKSK.11.5103.1.3	Jumlah layanan umum dan perlengkapan	Unit	2	4	6	8	10						
IKSK.11.5103.1.4	Jumlah produk hukum yang dihasilkan	Dokumen											
IKSK.11.5103.1.5	Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional	Orang			1	1	1						
2147-Pelayanan Haji Dalam Negeri								12	15	20	25	30	Penyelenggaraan Haji dan Umroh
SK.6.2147.1	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji												
IKSK.6.2147.1.1	Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan	%			75	85	95						
IKSK.6.2147.1.2	Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan	%	25	20	15	10	5						
SK.6.2147.2	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji di asrama haji												
IKSK.6.2147.2.1	Persentase asrama haji yang memenuhi standar pelayanan	%	75	80	85	90	95						
IKSK.6.2147.2.2	Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu	%	75	80	85	90	95						
2148-Pembinaan Haji								78	55	60	65	70	Penyelenggaraan Haji dan Umroh
SK.6.2148.1	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji												
IKSK.6.2148.1.1	Persentase petugas haji yang profesional	%	75	80	85	90	95						
IKSK.6.2148.1.2	Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji	%	90	92	94	96	98						
IKSK.6.2148.1.3	Persentase kasus jemaah haji yang terselesaikan	%											
IKSK.6.2148.1.4	Jumlah advokasi haji yang terselenggara	Kegiatan											
IKSK.6.2148.1.5	Persentase pembimbing haji yang bersertifikat	%											
2149-Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu								-	-	-	-	-	Penyelenggaraan Haji dan Umroh
SK.6.2149.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan dana operasional haji secara profesional, transparan, dan akuntabel												
IKSK.6.2149.1.1	Persentase realisasi pelaksanaan dana operasional haji	%											
SK.6.2149.2	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu												
IKSK.6.2149.2.1	Persentase keberlanjutan layanan (<i>Continuity service</i>)	%											
IKSK.6.2149.2.2	Tingkat kepuasan pengakses layanan <i>website</i> haji	Nilai											
2150-Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya penyelenggaraan haji dan umrah								1,201	1,270	1,325	1,350	1,400	Penyelenggaraan Haji dan Umroh
SK.6.2150.1	Meningkatnya penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal												
IKSK.6.2150.1.1	Persentase temuan administrasi dan keuangan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang diselesaikan	%											
SK.6.2150.2	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi												

Matriks Kinerja dan Pendanaan 12 Program

[illegible]



Lampiran 3

**TIM PENYUSUN RENSTRA
KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU
2020-2024**





Lampiran III

Tim Penyusun

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU TAHUN 2020-2024
(KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU
NOMOR 093 TAHUN 2021 TANGGAL 03 Februari 2021)

- I. Penanggung Jawab : H. Nasruddin L. Midu (Kepala Kantor)
- II. Ketua : Irsan (Kepala Sub. Bagian Tata Usaha)
- III. Sekretaris : Madya Ashari (Pranata komputer Ahli Pertama)
- IV. Anggota : 1. Hj. Nurlaili (Kepala Seksi Pendidikan Islam)
2. H. M.Talib (Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah)
3. Muhammad Isnaeni (Kepala Seksi Bimas Islam)
4. Daniel Rusli Wibowo (Penyelenggara Bimas Kristen)
5. I Nyoman Andreas (Penyelenggara Bimas Katolik)
6. Irfandi A. Noyo (Perencana Ahli Pertama)
7. Syafiyamilza (JFU pada Seksi Pendidikan Islam)
8. Alimudin A. Ismail (JFU pada Seksi Pendidikan Islam)
9. Fadlun Alhasni (JFU pada Seksi Bimas Islam)
10. Firda (JFU pada Seksi Bimas Islam)
11. Hijriyani Fitri (JFU pada Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah)
12. Susanty Lolok Panggula (JFU pada Penyelenggara Bimas Kristen)
13. Adolfin Tarima Dote (JFU pada Penyelenggara Bimas Katolik)
14. I Made Wiranadi (JFU pada Penyelenggara Bimas Hindu)